

**ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI
TAHUN 2017-2020**



Oleh :

Aannis Sania

18323066

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

**ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI
TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Aannis Sania

18323066

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI TAHUN 2017-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

30 Maret 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

3. Muhammad Rezky Utama S.IP., M.Si.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aannis Sania

No. Mahasiswa : 18323066

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan MBS dalam Upaya Modernisasi Arab Saudi Tahun
2017-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme. Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 12 April 2022



Aannis Sania

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alam, puji syukur kami panjatkan pada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan indahnya karunia nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari masa gelap hingga cerah. Serta wujud rasa syukur dan rasa terima kasih yang mendalam karena telah memberikan kemudahan bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI TAHUN 2017-2020*. Tidak terasa segala proses dan kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini berujung dengan luar biasa. Keinginan terbesar penulis dengan langkah awal ini tidak hanya mendapatkan gelar kelulusan semata, namun dengan akhir yang bahagia ini juga mampu untuk membawa pelajaran yang berarti bagi pengembangan kemampuan penulis, serta lebih jauh lagi mampu untuk membawa kebermanfaatan yang besar untuk bidang pendidikan dan masyarakat luas. Penulis sangat menyadari bahwa dalam menjalankan proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir perjuangan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan yang sangat berarti kepada penulis. Oleh karena itu, kami dengan kerendahan hati perkenankanlah penulis menghaturkan *jazakumullah ahsanal jazza* kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'alla yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis selama menempuh pendidikan serta dalam penyusunan skripsi selama ini.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku rektor dari Kampus Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan, nasihat dan pelajaran yang Insya Allah akan selalu saya ingat.
5. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing akademik serta dosen penguji skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan, pendampingan, serta dukungan yang telah bapak berikan selama kurang lebih 3,5 tahun penulis menempuh pendidikan di HI UII.

6. Bapak Willi Ashadi, S.HI., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan, bantuan, masukan, dukungan dan motivasi tanpa mengenal waktu ditengah kesibukan beliau selama masa skripsi penulis. Mohon maaf apabila dalam proses bimbingan skripsi terjadi kekhilafan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusannya, semoga segala perbuatan maupun kebaikan Bapak akan dibalas oleh Allah SWT dan menjadi ladang pahala.
7. Bapak Muhammad Rezky Utama S.IP., M.Si. selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan banyak masukan pada skripsi saya.
8. Ibu Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta informasi mengenai perkuliahan.
9. Kepada orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendo'akan, kakak Faizatul Fuadah, kakak Taufiq Imam Santosa, Diki Dermawan, Widi Nanda, beserta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan mendo'akan saya.
10. Kepada teman-teman saya Safira Tazkia, Rahmania Audita, Widiya, Madhan, Salma, beserta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis serta para pembaca.

Yogyakarta, 12 April 2022



Aannis Sania

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Cakupan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Kerangka Pemikiran	15
1.7 Argumen Sementara	19
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian.....	20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	20
1.8.4 Proses Penelitian	21
1.9 Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II DINAMIKA DAN SISTEM PEMERINTAHAN ARAB SAUDI	23
2.1 Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Arab Saudi.....	23
2.1.1 Profil Raja Salman bin Abdulaziz	25
2.1.2 Profil Muhammad bin Salman.....	26
2.2 Visi Ekonomi 2030 Arab Saudi	27
2.2.1 Visi Ekonomi 2030: Sebagai Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Arab Saudi	29
2.3 Kebijakan Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020.....	31
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI MENGGUNAKAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL AUGUSTE COMTE	34

3.1 Dampak Modernisasi Arab Saudi Terhadap Perubahan Sosial	52
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Harga Minyak Arab Saudi Tahun 2014 yang mulai mengalami penurunan (Omar, 2020)	28
Gambar 2. Pola Linier Teori Tiga Tahap (Martono, 2012).....	35
Gambar 3. Pendaftaran perempuan Arab Saudi untuk gelar sarjana di universitas tahun 2000-2009 (Yahya Al Alhareth, Ibtisam Al Dighrir, & Yasra Al Alhareth, 2015).....	37
Gambar 4. Pendapatan Pariwisata Arab Saudi (CIEC DATA, 2020)	46
Gambar 5. Konsumsi Pribadi Masyarakat Arab Saudi (CEIC Data, 2021)	48
Gambar 6 Grafik Pengeluaran Arab Saudi untuk Mengatasi Harga Minyak yang Rendah (Omar, 2020).....	53

ABSTRAK

Arab Saudi merupakan negara yang terluas di kawasan Timur Tengah dan wilayahnya memiliki gurun pasir yang gersang sehingga menyebabkan persebaran penduduknya tidak merata. Ekonomi Arab Saudi mengalami perubahan yang drastis ketika ditemukannya minyak di kawasan Timur Tengah. Tetapi, seiring berjalannya waktu harga minyak dunia tidak stabil. Pada tahun 2014 harga minyak mulai mengalami penurunan terus-menerus, sehingga hal ini membuat pemerintah Arab Saudi berusaha mencari solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Pada 25 April 2016, MBS mengumumkan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketergantungan Arab Saudi kepada minyak yang disebut dengan visi 2030, yang mana visi 2030 ini akan memanfaatkan sumber daya manusia untuk memodernisasi ekonomi Arab Saudi. Diantara program dari visi 2030 ini yaitu: pemberdayaan manusia, dibukanya bioskop, hingga adanya visa turis asing selain untuk kunjungan haji dan umroh.

Kata Kunci: Arab Saudi, MBS, Visi 2030, Minyak, dan Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Saudi Arabia is the largest country in the Middle East region and its territory has an arid desert which causes the distribution of its population to be uneven. Saudi Arabia's economy underwent a drastic change when oil was discovered in the Middle East. However, over time world oil prices are unstable. In 2014 the price of oil began to decline continuously, so this made the government of Saudi Arabia try to find a solution to get out of this problem. On April 25, 2016, MBS announced a series of economic policy changes to address Saudi Arabia's dependence on oil called Vision 2030, in which Vision 2030 will utilize human resources to modernize Saudi Arabia's economy. Among the programs from Vision 2030 are: human empowerment, the opening of cinemas, to the existence of foreign tourist visas other than for Hajj and Umrah visits.

Keywords: Saudi Arabia, MBS, Vision 2030, Oil, and Human Resources

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara yang terluas di kawasan Timur Tengah yang hanya memiliki lahan produktif sekitar 1%, dan wilayah lain dari Arab Saudi dipenuhi oleh gurun pasir yang gersang sehingga memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Dimana sebaran penduduk Arab Saudi terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan pada pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki laju urbanisasi yang tinggi. Pada wilayah perkotaan seperti Makkah, Riyadh, dan wilayah bagian timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena banyak terdapat lapangan pekerjaan dan berbagai proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Wilayah Arab Saudi yang berada di tengah-tengah Jazirah Arab memiliki posisi cukup strategis dari akses laut, darat, dan udara. Kemudian, wilayah Arab Saudi juga diapit oleh dua jalur tersibuk di dunia, yaitu Laut Merah yang menuju kepada Terusan Suez dan Laut Persia (Indriana Kartini, 2020).

Kerajaan Arab Saudi sebagai negara yang memiliki sistem monarki absolut yang dikendalikan sepenuhnya oleh Raja dan keluarga kerajaan. Karakter dari pemerintahan Arab Saudi sendiri lebih condong kepada bentuk oligarki, terlihat dari komposisi kabinet dalam pemerintahan yang lebih identik dengan keluarga kerajaan. Dengan demikian, membuat otoritas segala kebijakan Arab Saudi berada di tangan kerajaan, sehingga dengan adanya berbagai macam keputusan masyarakat Arab Saudi hanya bisa menerima apa yang telah dijadikan sebagai keputusan oleh kerajaan. Sistem ini sangat melekat pada budaya masyarakat Arab Saudi yang pada umumnya lebih suka dipimpin oleh orang-orang yang terpandang di antara mereka. Karena status negara ini diturunkan oleh satu keluarga, maka keluarga kerajaan memiliki kekuasaan istimewa, sehingga mempermudah kerajaan untuk menguasai seluruh sektor dalam negara Arab Saudi. Hal ini yang membuat Arab Saudi dapat mewujudkan tujuan-tujuannya sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Kemudian, hal tersebut yang membuat masyarakat Arab Saudi seakan-akan tidak memiliki power

untuk berinovasi dalam melakukan hal sesuai apa yang diinginkan dan masyarakat wajib untuk patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Roji, 2017).

Ekonomi Arab Saudi mengalami perubahan ketika ditemukannya minyak di Kawasan Timur Tengah yang membuat Arab Saudi menjadi produsen minyak dunia ketika menjadi pemasok negara-negara Barat pada tahun 1948. Kemudian, pada tahun 2016, Arab Saudi tidak hanya menjadi produsen terbesar di dunia, tetapi memproduksi minyak setiap hari dengan jumlah yang sangat tinggi dan berhasil menguasai produksi minyak di kawasan Timur Tengah. Karena produksi minyak ini, ekonomi Arab Saudi mengalami peningkatan yang cukup drastis dan sangat menguntungkan bagi negara. Sehingga, Arab Saudi sekarang menjadi negara yang kaya karena penemuan minyak ini (Indriana Kartini, 2020).

Dengan adanya minyak dan gas yang melimpah di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi, membuat kerajaan Arab Saudi merasa khawatir akan ketergantungan kepada minyak akan membawa hal yang buruk untuk kedepannya. Karena, harga minyak yang sering naik turun dan persaingan ekonomi internasional yang semakin meningkat, sehingga kerajaan Arab Saudi berusaha untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya. Kemudian dengan diresmikannya pencabutan larangan pengemudi perempuan di Arab Saudi oleh Raja Salman bin Abdulaziz pada 26 September 2017, hal ini membantu menyelesaikan salah satu dilema sosial cukup lama yang dialami para perempuan Arab Saudi yang selama ini menjadi penghalang bagi para perempuan supaya bisa melakukan aktivitas lebih bebas dan leluasa di luar rumah. Raja Salman bin Abdulaziz mengeluarkan Keputusan Kerajaan (*Royal Decree*) untuk menambahkan ketentuan baru pada Keputusan Kerajaan Nomor M/85 tentang aturan lalu lintas dan pemerintah menyatakan telah melakukan dengan pertimbangan pro dan kontra terkait perizinan pengemudi perempuan. Keputusan baru ini dinamakan “*Royal Order to Adopt the Provisions of the Traffic Law and Its Executive Regulation, Including Issuance of Driving Licenses for Males and Femals Alike*” kemudian ini menjadi instrumen hukum legal pertama sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan izin kepada perempuan untuk mengemudi (MUJIHASTUTI, 2019).

Selain adanya pemberian izin kepada perempuan untuk mengemudi, pemerintah Arab Saudi juga membangkitkan dari sektor industri hiburan dan pariwisata. Diantaranya dengan membuka bioskop-bioskop komersial di Arab Saudi yang dibuka pertama kali

pada 18 April 2018, yang mana bioskop di Arab Saudi dilarang beroperasi selama 35 tahun. Pemerintah Arab Saudi berharap dengan dibukanya bioskop akan menjadi sumber ekonomi untuk negara. Kemudian, pemerintah Arab Saudi menawarkan visa turis untuk mendongkrak pada sektor pariwisata, yang mana sebelumnya Arab Saudi hanya menerbitkan visa bagi pekerja asing dan peziarah muslim, serta visa bagi penonton acara olahraga. Selanjutnya, Arab Saudi juga membangun taman hiburan terbesar di negaranya. Proses pembangunan taman hiburan ini dimulai pada tahun 2018 dengan luas mencapai 334 kilo meter persegi (Haryanti, 2019).

Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak baik dari Arab Saudi maupun Internasional. Karena Arab Saudi adalah satu-satunya negara di kawasan Teluk yang tidak mengizinkan perempuan untuk mengemudi sendiri. Larangan ini berakar dari tradisi Islam yang menyatakan bahwa perempuan dilarang bepergian kecuali dengan suami atau kerabat lelaki mereka dan larangan ini juga berasal dari fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Sheikh Abdulaziz Al Sheikh yang menjadi anggota senior dari Dewan Ulama, dengan alasan bahwa ketika perempuan mengemudi tanpa adanya wali di sampingnya hanya akan membawa kerugian bagi dirinya yang dilihat dari segi agama Islam. Sistem hukum di Arab Saudi memiliki pedoman yang berasal dari interpretasi nilai-nilai Islam yang secara tidak langsung membatasi aktivitas perempuan (Grigsby, 2015).

Keputusan ini diambil Raja Salman bin Abdulaziz karena sedang menjalankan Visi 2030 yang menganggap bahwa perempuan merupakan aktor penting untuk mewujudkan Visi 2030 dengan potensi-potensi yang dimiliki dan Raja Salman bin Abdulaziz yang menganggap bahwa peran perempuan cukup berpengaruh dalam suatu negara baik dari segi ekonomi maupun dari segi politik. Sehingga keputusan tentang memberikan izin mengemudi kepada perempuan Arab Saudi dapat membantu mewujudkan negara yang modern dan membantu negara dari segi ekonomi. Dengan adanya modernisasi Arab Saudi dan adanya Visi 2030 yaitu untuk perubahan arah kekuasaan negara menjadi lebih moderat dari kekuasaan-kekuasaan sebelumnya. Keputusan ini merupakan sebuah langkah baru dan momentum penting yang diputuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud dalam Visi 2030 yaitu untuk menghilangkan ketergantungan kekuasaan pemerintah terhadap sektor perminyakan dan hal ini menjadikan tantangan reformasi ekonomi yang akan mengesankan (Rosida, 2018).

Visi 2030 yang dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memodernisasikan kawasan Arab, terdapat beberapa kebijakan dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Arab Saudi yang bergantung kepada minyak. Perencanaan ini merupakan sebuah proses diversifikasi perekonomian negara yang tidak hanya meliputi masalah materi finansial saja, namun juga mencakup masalah tentang kredibilitas negara Arab Saudi yang menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Salah satu aset untuk modernisasi yaitu dengan mengantar peran perempuan untuk mengembangkan bakatnya dan bagaimana perempuan dapat menginvestasikan kemampuan yang dimiliki (Rosida, 2018). Dengan berkembangnya visi 2030 yang dicetuskan oleh MBS diharapkan bisa membuka peluang investasi-investasi dari berbagai negara untuk Arab Saudi serta bisa menjalin kerjasama antar negara. Seperti perusahaan Mexico yaitu Cinopolis akan melakukan investasi kepada Arab Saudi pada bidang perfilman dan industri hiburan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu:

Bagaimana kebijakan MBS dalam upaya memodernisasikan Arab Saudi tahun 2017- 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh MBS dalam upaya memodernisasikan Arab Saudi tahun 2017-2020

1.4 Cakupan Penelitian

Mengenai penelitian ini, penulis mencoba melakukan analisis terkait kebijakan yang dilakukan oleh MBS dalam memodernisasikan Arab Saudi tahun 2017-2020. Terkait pembahasan tersebut, penulis membatasi pembahasan yang dilakukan dari tahun 2017 dimana mulainya rencana memodernisasikan Arab Saudi sampai tahun 2020 hingga mulai terimplementasi salah satu bentuk dari rencana tersebut. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini terkait akomodasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam memodernisasikan negaranya guna mengurangi ketergantungan kepada minyak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada jurnal yang berjudul “*Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975*” yang berisi tentang waktu transisi Arab Saudi dari negara yang berkarakteristik kesukuan menjadi negara yang menjalani proses kenegaraan yang mengutamakan metode *nation state* sebagai model utama negara. Kemudian, pada masa-masa tersebut terdapat bentuk perubahan sosial yaitu mengenai struktur sosial Arab Saudi, sosial budaya Arab Saudi, dan sosial politik Arab Saudi. Dalam bagian struktur sosial, Arab Saudi mengalami cukup banyak perkembangan serta keberagaman komposisi struktur sosial yang ada, yaitu dengan munculnya golongan kerajaan yang menempati pada stratifikasi tertinggi dalam struktur sosial yang kemudian melakukan dominasi negara dan juga berkuasa dalam mengatur negara. Kemudian, pada perkembangannya muncul juga golongan kaum kaya serta kaum menengah baru yang berasal dari masyarakat Arab Saudi yang bertransformasi.

Selanjutnya, dalam jurnal ini juga dijelaskan pada aspek perubahan sosial-budaya yang terkait sosial politik mengalami perubahan terutama pada perubahan sosial yang mengarah pada modernisasi, tetapi masih terhalang oleh budaya tradisional. Sedangkan pada aspek sosial-politik, Arab Saudi mengalami perubahan identitas legitimasi kekuasaan menjadi legitimasi kenegaraan yang dialami klan Al Saud. Klan Al Saud ini pada awalnya hanya memiliki kekuasaan dengan identitas yang dasar sebagai klan dominan di Arab Saudi dan bukan hanya sebagai klan yang dominan, tetapi sekarang memiliki kekuatan legal dalam menjalani dan memimpin pada ruang lingkup negara (Machmudi, 2017).

Pada jurnal yang berjudul “*MODEL PENERAPAN SYARIAH DALAM NEGARA MODERN: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia*” yang berisi tentang dampak yang ditimbulkan dari modernisasi politik pada dunia Islam yang keras dalam hubungan dengan agama atau syariah dengan negara. Kemudian berisi tentang sistem politik Islam yang tidak tunggal yang membahas mengenai kedudukan syariah dan model penerapannya dalam eksistensi negara Islam modern. Bahwa ajaran Islam melingkupi setiap aspek kehidupan umat yang perwujudannya ada pada syariah. Namun, dalam prakteknya memiliki berbagai macam penafsiran terhadap isi syariah itu. Di berbagai penjuru negara Islam, penafsiran-penafsiran tentang syariah muncul dan saling bertentangan satu sama lain karena memiliki beberapa perbedaan. Hal ini yang membuat Islam memiliki sifat multi-interpretatif. Kemudian, pada masalah politik Islam sifat multi-interpretatif tidak bisa dihindari. Karena, pada sifat Islam yang multi-interpretatif ini telah

membuktikan bahwasannya tidak ada pandangan yang tunggal mengenai bagaimana seharusnya suatu hubungan yang tepat dan sesuai dalam politik Islam tersebut (Fauzan, 2018).

Kemudian, dalam jurnal yang berjudul “*MENUJU MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM*” yang berisi tentang usaha dalam menunjukkan adanya sekolah Islam yang unggul dan memiliki semangat ideologi sehingga membangkitkan pengembangan modernisasi pendidikan Islam. Modernisasi dalam pendidikan disajikan sebagai dasar untuk memahami bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh dunia Islam. Modernisasi lebih merujuk kepada objek yang bersifat abstrak dan mewakili satu suasana intelektual. Kemajuan pada teknologi modern dan ilmu pengetahuan yang memasuki dunia Islam sekitar abad ke-19 M, yang dipandang oleh sejarah Islam sebagai permulaan periode Modern. Adanya kontak dengan dunia Barat yang membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti nasionalisme, rasionalisme, maupun demokrasi. Latar belakang munculnya pembaharuan disebabkan oleh kemunduran umat Islam pada abad ke-10.

Dalam banyak hal, pendidikan biasanya digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik maupun ekonomi. Untuk mencapai tujuannya, pendidikan pada proses modernisasi akan mengalami perubahan pada sistemnya dan perubahan fungsional. Pada kasus dunia pendidikan politik Islam, modernisasi merupakan usaha yang serius umat Islam agar proses pembangunan yang mereka lakukan dapat mewakili gaya hidup Islam. Pendidikan Islam terus memformulasikan diri agar pengguna layanannya yaitu generasi muda Islam dapat tetap berpartisipasi dengan kebutuhan masyarakatnya yaitu ketersediaan tenaga yang terampil maupun ahli yang dipersyaratkan untuk mengisi sektor-sektor kerja pembangunan nasional, serta menjadi subjek yang mandiri dalam menjalani proses sejarah kemanusiaan. Kemudian, terdapat beberapa negara Islam yang berusaha mengejar ketertinggalannya dalam dunia pendidikan dari bangsa Barat yang lebih maju. Selanjutnya mereka mulai ikut belajar dengan bangsa Barat dengan cara mengirim anak-anak bangsa yang terbaik dalam menimba ilmu untuk lebih dikembangkan di dalam negerinya seperti Turki (Hartono, 2019).

Pada literatur selanjutnya yang berjudul “*PENDIDIKAN ISLAM DI SAUDI ARABIYAH DAN SEKITARNYA PASCA JATUHNYA TURKI USMANI*” yang membahas tentang pendidikan Islam di Arab Saudi dan sekitarnya setelah jatuhnya Turki Usmani, yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan gerakan pembaharuan pemikiran

pada bidang pendidikan Islam oleh sejumlah tokoh reformis. Pembaharuan pendidikan Islam ini berupa pemurnian kembali mengenai ajaran Islam dari unsur-unsur yang merusak akidah serta penerapan sistem pendidikan modern dari Barat. Keberhasilan dalam pendidikan Islam serta penerapan teknologi di Arab Saudi ini, karena ditopang dengan adanya sumber daya alam yang berupa dengan minyak dan gas yang sangat melimpah. Dalam literatur ini juga dijelaskan bahwa eksistensi perguruan tinggi negeri maupun swasta dan penerapan riset teknologi modern telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Arab Saudi, terutama dalam upaya kerajaan Arab Saudi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi, harus diwaspadai mengenai faham-faham keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena Arab Saudi menganut hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (AZIS, 2016).

Selanjutnya pada jurnal yang berjudul *“PEREMPUAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM (Studi Kasus Dekrit Kerajaan Arab Saudi Nomor M/134 tahun 2019)* yang berisi mengenai dinamika sosial dan hukum Islam yang saling berkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dianggap dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam sudah menjadi adat dan menjadi hukum positif bagi suatu masyarakat. Adanya Dekrit Kerajaan Arab Saudi No. M/134 tahun 2019 mengenai kebebasan perempuan bepergian tanpa mahram hal ini didorong oleh pengaruh perubahan ekonomi dan sosial.

Diberlakukannya kebijakan ini tidak akan terlepas dari strategi penguasa dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Kemudian, untuk membuktikan upaya modernisasi terbuka dan Islam moderat yang berlangsung di Arab Saudi, salah satunya dengan menarik isu perempuan dan masalah gender sebagai salah satu langkah yang efektif untuk mengemas isu-isu negatif yang selama ini menjadi dilemma sosial bagi Arab Saudi menjadi salah satu langkah yang dapat menguntungkan negara. Pada jurnal ini, peran perempuan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam mendorong terjadinya perubahan sosial pada struktur yang ada (Mansyuroh, 2020).

Dalam beberapa literatur diatas, telah dijelaskan mengenai berbagai masalah modernisasi di Arab Saudi. Mulai dari sebelum modern menuju pada modern, penerapan syariah pada negara modern, modernisasi dari segi pendidikan, sampai modernisasi dari segi kebijakan kerajaan yaitu dibolehkannya perempuan mengemudi tanpa mahram. Penulis ingin meneliti masalah modernisasi ini dari aspek yang berbeda yaitu dengan

dicetuskannya visi 2030 oleh MBS untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak. Hal ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial dari struktur sosial yang ada serta mendorong dan mengapresiasi budaya lokal yang terbuka dan memperkaya kebudayaan masyarakat Arab Saudi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis tentunya akan membutuhkan teori atau konsep untuk dijadikan sebagai landasan bagi penelitiannya. Para ilmuwan hubungan internasional, teori digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi di dunia internasional dan teori ilmu hubungan internasional ini memiliki definisi yang cukup beragam. Landasan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan rumusan masalah pada penelitian ini yakni menggunakan teori perubahan sosial atau yang biasa disebut dengan teori *social change*. *Social change theory* merupakan perubahan yang terdapat pada masyarakat terkait dengan perubahan cara berpikir, nilai-nilai, sikap sosial, norma, dan perubahan lainnya di dalam bermasyarakat.

Menurut Auguste Comte, fenomena perubahan sosial dilihat sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan yang bertahap, mulai dari daya pemikiran masyarakat sendiri atau yang disebut dengan “evolusi intelektual”. Dalam kehidupan suatu masyarakat memiliki banyak unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Tetapi, diantara unsur-unsur tersebut harus memiliki salah satu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. August Comte membagi 3 tahap perkembangan intelektual manusia yang berkaitan dengan tahap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umum, yaitu tahap teologis primitif, tahap metafisik transisional, dan tahap positif rasional (Comte, 1858).

Pada tahap positif merupakan tahap yang paling sempurna dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya yang ditemukan oleh Comte. Pada tahap ini ditandai dengan kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Suatu kejadian atau perubahan yang terjadi selalu dikaitkan dengan faktor lain. Seperti yang terjadi di Arab Saudi dengan dibuatnya kebijakan modernisasi tersebut dikarenakan harga minyak mengalami penurunan atau tidak stabil. Pada tahap ini pemerintah berusaha membuat

kebijakan atau inovasi-inovasi baru untuk mengatasi permasalahan mengenai minyak. Intervensi tersebut yang biasanya dituangkan ke dalam berbagai program-program pembangunan yang dilakukan secara bertahap dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pada suatu wilayah (Comte, 1858).

Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang mudah dilakukan secara tiba-tiba, karena perubahan sosial banyak melibatkan aktor-aktor dalam negara. Munculnya gagasan-gagasan baru tidak dapat diterima begitu saja oleh banyak kalangan di suatu masyarakat. Karena proses perubahan pola pikir masyarakat yang dominan menyebabkan sulitnya gagasan-gagasan baru untuk masuk pada suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya proses perubahan sosial harus secara perlahan dan bertahap, sehingga dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial ataupun konflik dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, dimana masyarakat yang masih memiliki cara pandang yang primitive, dengan adanya visi 2030 yang akan banyak menyebabkan perubahan sosial di Arab Saudi harus dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya konflik sosial di antara pemerintah dan masyarakat Arab Saudi sendiri.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait upaya modernisasi Arab Saudi yang dicetuskan oleh MBS yang disebut dengan visi 2030 untuk mengurangi ketergantungan kepada sektor minyak, untuk memberdayakan sumber daya manusia, serta terjadinya perubahan sosial di masyarakat Arab Saudi. Visi ini memiliki 3 pilar penting yaitu Masyarakat Dinamis, pengembangan Ekonomi, serta Ambisi Nasional Negara. Ketiga pilar ini akan direalisasikan ke dalam beberapa program kerja. Untuk melakukan program ini pemerintah harus melakukan secara bertahap untuk menghindari konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Karena program ini akan berdampak terhadap perubahan sosial. Adanya visi 2030 diharapkan bisa membawa Arab Saudi menjadi negara yang maju dan bisa menarik banyak kerjasama dengan negara lain terutama pada bidang investasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk memaparkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terkait modernisasi dianggap akan memberikan dampak positif kepada ekonomi negara yang tidak hanya bergantung kepada minyak saja serta tersedianya lapangan pekerjaan yang baru serta adanya perubahan sosial dalam masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif yang mengacu pada data yang telah diperoleh melalui studi literatur sehingga bertujuan untuk membantu penulis agar lebih mudah dalam menganalisis. Selain itu, metode kualitatif merupakan metode utama dalam studi ilmu sosial dan politik yang digunakan dalam menganalisis penelitian. Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini akan bersifat analisis dan deskriptif.

Peneliti akan menggunakan jenis data yang digunakan dalam menunjang penelitian yaitu menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh penulis melalui jurnal-jurnal, berita, buku, dan sumber literatur lainnya yang dapat mendukung dalam menganalisis penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang berupa data dan fakta yang dapat memberi pengetahuan terhadap studi yang akan dianalisis peneliti. Subjek penelitian tersebut adalah sumber sekunder yang berupa artikel dalam jurnal, buku, berita, surat kabar, situs resmi, dan literatur lainnya yang dipilih dari penerbit yang kredibel dan memiliki validitas data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan objek penelitian merupakan apa yang akan dikaji selama kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian kualitatif merupakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu pelaku, tempat, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun subjek dalam penelitian ini MBS, dan objek untuk penelitian ini adalah Upaya modernisasi Arab Saudi

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelusuran daring (*online browsing*). Berkembangnya internet yang begitu pesat membuat para akademis menjadikan media dalam jaringan atau online sebagai salah satu media penelusuran informasi menggunakan data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi, data, atau teori yang dibutuhkan oleh peneliti harus diperoleh dari sumber yang kredibel dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini peneliti membutuhkan *skill* pencarian dalam mesin pencari yang menampung basis data seperti *Google Scholar*, *Proquest*, ataupun *Jstor*.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Pra-riset

Persiapan penelitian terkait tema yang akan diteliti dengan cara melihat data yang terkait penelitian sampai membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.

2. Pengambilan data

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dari sumber sekunder yang meliputi berita, jurnal, buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan ketika data telah terkumpul. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a. Menyiapkan data serta mengorganisir data

Langkah ini dilakukan dengan berfokus pada data yang berasal dari berbagai sumber.

b. Membaca semua data

Membaca data merupakan langkah selanjutnya ketika data telah terkumpul. Dalam membaca data, penulis diharapkan mampu menemukan sumber terkait dengan penelitian.

c. Mengaitkan tema atau deskripsi

Langkah ini penting karena dalam mengaitkan tema dapat membantu untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

d. Interpretasi arti

Langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu dengan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini berguna untuk memahami makna data yang telah dikumpulkan untuk memahami makna data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Interpretasi arti juga penting dalam menjelaskan kembali makna data.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. DINAMIKA DAN SISTEM PEMERINTAHAN ARAB SAUDI

Bab ini berisi bentuk negara dan sistem pemerintahan di Arab Saudi, profil Raja Salman, profil Muhammad bin Salman, visi ekonomi 2030 Arab Saudi, visi ekonomi 2030: sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Arab Saudi, serta kebijakan modernisasi Arab Saudi tahun 2017-2020.

BAB III. ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI MENGGUNAKAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL AUGUSTE COMTE

Bab ini berisi dampak modernisasi Arab Saudi terhadap perubahan sosial.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

DINAMIKA DAN SISTEM PEMERINTAHAN ARAB SAUDI

Arab Saudi sebagai negara yang memiliki kekayaan yang berupa sumber daya alam minyak dan sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki dan terkenal sebagai negara Islam, tetapi Arab Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya Arab Saudi menjalankan dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada di Arab Saudi. Sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang dijalankan oleh Arab Saudi dipandang oleh banyak negara sebagai sistem pemerintahan monarki yang kuno.

Arab Saudi sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang absolut yang berdasarkan dengan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan dengan syariat Islam. Dalam persoalan panduan untuk raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Arab Saudi serta permasalahan tuntutan juga dibuat sesuai dengan ajaran Islam. Sistem pemerintahan monarki yang dijalankan Arab Saudi dimana raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas (Nadia, 2020).

2.1 Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan atau monarki dan juga terkenal sebagai negara Islam yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa minyak. Arab Saudi yang terkenal sebagai negara Islam, tetapi dalam menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan sistem Islam. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi yaitu berupa pemerintahan kerajaan atau monarki. Dalam menjalankan sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, Arab Saudi memiliki beberapa penyesuaian yang telah diputuskan berdasarkan dengan kondisi Arab Saudi.

Raja Arab Saudi mendapat gelar sebagai penjaga serta pelayan umat Islam, sehingga hukum yang berlaku di Arab Saudi berupa hukum dari syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, Raja Arab Saudi juga memiliki peran sebagai kepala negara, perdana menteri, penjaga dua kota suci, panglima angkatan perang, serta memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri dan juga memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum setelah melalui sejumlah konsultan dan konsensus (Nadia, 2020).

Sistem pemerintahan kerajaan atau monarki yang dijalankan Arab Saudi sering dianggap oleh banyak negara sebagai sistem pemerintahan yang kuno dan reaksioner. Semua hukum yang berlaku di Arab Saudi dibuat berdasarkan syariat Islam, meskipun Arab Saudi sebagai negara yang berbentuk kerajaan yang menjalankan sistem pemerintahan yang absolut berdasarkan agama Islam. Panduan untuk raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Arab Saudi serta permasalahan tuntutan juga dibuat berdasarkan dengan ajaran Islam. Dalam sistem monarki Arab Saudi kekuasaan raja tidak terbatas, raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Berdasarkan sistem pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan monarki absolut, Arab Saudi juga memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan republik. Akan tetapi, di Arab Saudi lembaga-lembaga tersebut masih berada dibawah kendali raja dan masih belum memiliki fungsi independensi sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang menganut pada sistem pemerintahan republik (Nadia, 2020).

Berikut 3 lembaga kekuasaan yang ada di Arab Saudi:

1. Lembaga Eksekutif

Raja dan Perdana Menteri menjadi pemimpin eksekutif di Arab Saudi mulai dari tanggal 1 Agustus 2005 sampai sekarang. Arab Saudi menjadi salah satu negara dimana raja menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam pemerintahan Arab Saudi, para dewan menteri ditunjuk secara langsung oleh raja yang mayoritas berasal dari keturunan dan kaum kerabat raja. Tetapi, pada Oktober 2003 terdapat upaya perbaikan terhadap sistem pemilihan dengan mengumumkan niat untuk mengadakan pemilu dari setengah anggota wakil pemerintahan lokal dan provinsi dan sepertiga dari anggota dewan al-syura dalam waktu empat hingga lima tahun (Nadia, 2020).

2. Lembaga Legislatif

Badan Legislatif di Arab Saudi disebut dengan Majelis Al-Shura dan memiliki peran untuk mengevaluasi, menafsirkan, serta memperbaiki hukum pemerintah, hukum kecil, kontrak dan perjanjian internasional. Dengan adanya lembaga legislatif atau Majelis Al-Shura ini yang terus dikembangkan oleh Raja Fahd maupun raja Abdullah, Arab Saudi sudah mulai mengalami perkembangan ke arah monarki konstitusional. Kekuasaan atau wewenang raja mulai mengalami pergeseran, meskipun lembaga ini

prosedur kinerjanya belum sepenuhnya independen karena masih mempertimbangkan pendapat dari raja dan masih berada dalam kontrol Raja Arab Saudi (Nadia, 2020).

3. Lembaga Yudikatif atau Cabang Kehakiman

Dalam lembaga Yudikatif, Arab Saudi memiliki lembaga Pengadilan tertinggi yaitu Dewan Kehakiman Agung yang membicarakan tentang hal-hal yang disebutkan oleh raja. Dewan Kehakiman Agung merupakan mahkamah banding tertinggi di Arab Saudi yang menimbang banding serta merevisi kasus yang melibatkan hukuman mati atau mutilasi yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah. Pada pengadilan tingkat kedua terdiri dari dua pengadilan yang mendengar rayuan dan yang tertinggi adalah pengadilan banding yang terdiri dari lima atau lebih hakim. Pengadilan ini bisa mendengar semua rayuan kecuali kasus-kasus dari badan administrasi dan pengadilan atau konflik antara pengadilan syariah rendah dengan pengadilan yang lain. Kemudian adalah pengadilan terbatas, pengadilan ini mendengar kasus-kasus kecil yang melibatkan hal perdata atau pidana. Sedangkan pengadilan terendah adalah pengadilan umum yang mendengarkan kasus pribadi, sipil, keluarga, serta kriminal (Nadia, 2020).

2.1.1 Profil Raja Salman bin Abdulaziz

Salman bin Abdulaziz Al Saud merupakan Raja Arab Saudi ketujuh dan menjadi penjaga dua kota suci Makkah dan Madinah. Raja Salman bin Abdulaziz lahir pada tanggal 31 Desember 1935 di kota Riyadh, Arab Saudi. Raja Salman bersama dengan saudara laki-lakinya yang lain dijuluki sebagai *Sudayri Seven*, yaitu tujuh putra yang lahir dari istri yang paling dicintai oleh Abdulaziz bin al-Saud, yaitu Hussa binti Ahmad Sudayri. Raja Salman menjadi anak ke-25 dari Ibnu Saud dan menjadi raja untuk menggantikan kakaknya Raja Abdullah yang wafat pada 25 Januari 2015. Semasa kecil Raja Salman tinggal di Istana Murabba dan menjalani pendidikan di Princes School, Riyadh. Princess School yang menjadi tempat anak-anak raja mencari ilmu. Raja Salman bin Abdulaziz menikah sebanyak 3 kali, istri yang pertama bernama Sultana binti Turki Al Sudairi yang wafat pada usia 71 tahun pada 2011 yang lalu. Pada pernikahan yang pertama, Raja Salman bin Abdulaziz dikaruniai sebanyak enam anak yaitu Fahd bin Salman, Ahmad bin Salman, Sultan bin Salman, dan Abdulaziz bin Salman, Faisal bin Sultan, dan Hussa binti Salman (Haif, 2015).

Pada sebelumnya, Raja Salman menjadi Deputy Gubernur Riyadh yang kemudian

menjabat menjadi Gubernur Riyadh selama kurang lebih 48 tahun. Ketika Salman bin Abdulaziz menjadi gubernur di Riyadh, beliau telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan kota Riyadh dari yang awalnya kota menengah ke kota besar metropolitan. Beliau juga meningkatkan sektor pariwisata, investasi-investasi asing di Arab Saudi, serta proyek-proyek penting. Dalam waktu kurang lebih 48 tahun, Salman bin Abdulaziz berhasil mengubah Riyadh, kota padang pasir menjadi kota yang dipadati dengan gedung-gedung pencakar langit, jaringan makan cepat saji, serta universitas. Pada tahun yang sama ketika dipilih menjadi Gubernur Riyadh, Raja Salman ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Pada hari yang sama, Raja Salman juga terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) dikarenakan Raja Salman memiliki kompetensi yang luar biasa. Kepandaian dalam berdiplomasi juga membuat beliau di segani di kalangan suku-suku Arab Saudi. Ketika Nayef bin Abdulaziz al Saud wafat, Salman dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota dan dinobatkan menjadi Raja Arab Saudi ketika usianya mencapai 79 tahun. Raja Salman dikenal memiliki pandangan konservatif dan tradisional seperti saudaranya. Raja Salman sebelumnya telah banyak mengurus urusan kerajaan ketika saudaranya menghadapi masalah kesehatan saat memimpin sebagai raja. Setelah memegang kuasa, Raja Salman melakukan *reshuffle* kabinet pada 30 Januari 2015 (Haif, 2015).

Dibawah kepemimpinan Raja Salman yang sekarang ini, Arab Saudi memiliki warna baru dalam pemerintahannya. Raja Salman merupakan sosok pemimpin yang sering turun lapangan untuk melihat kondisi masyarakat langsung. Hal ini dapat dilihat dari kasus jatuhnya alat berat crane saat kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji pada tahun 2015 (Haif, 2015).

2.1.2 Profil Muhammad bin Salman

Muhammad bin Salman merupakan putra sulung dari istri ketiga Raja Salman yang diangkat menjadi Putra Mahkota dengan usia yang cukup muda pada 21 Juli 2017. Muhammad bin Salman diangkat oleh Raja Salman yang sebelumnya mencabut keponakannya sendiri yaitu Muhammad bin Nayef dari posisi Putra Mahkota (JAZEERA, 2020). Raja Salman memberikan sejumlah jabatan penting mengenai kerajaan kepada Muhammad bin Salman. Meskipun demikian Muhammad bin Salman

memiliki pemikiran yang terbuka dari pemikiran penguasa sebelumnya, sehingga Muhammad bin Salman dapat melakukan langkah yang berbeda dari pemikiran penguasa Arab Saudi sebelumnya. Dimana, penguasa sebelumnya memegang teguh doktrin yang konservatif. Hal ini dijadikan oleh Putra Mahkota sebagai kesempatan untuk mereformasi kerajaan ke arah Islam Moderat (Haryadi, 2018).

Sebelum menjadi Putra Mahkota, Muhammad bin Salman sudah memimpin dan mencetuskan program reformasi. Sehingga dengan diangkatnya menjadi Putra Mahkota, Muhammad bin Salman memiliki kesempatan untuk memperkuat program reformasi dengan lebih leluasa di kerajaan Arab Saudi.

Muhammad bin Salman menempuh pendidikan di dalam negeri yaitu Universitas King Saud. Muhammad bin Salman sejak umur 22 tahun sudah terjun dalam urusan pemerintahan dan tetap melanjutkan karir politiknya. Kemudian pada tahun 2013, Muhammad bin Salman mendapatkan penghargaan *Forbes Middle East* karena berperan dalam mendirikan dan menjadi ketua organisasi MiSK untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinannya para kaum muda Arab Saudi baik dari bidang sains, bisnis, hingga budaya. Sehingga dengan diangkatnya menjadi Putra Mahkota, Muhammad bin Salman diharapkan dapat memberikan keleluasaan untuk menjalankan reformasi yakni dengan melihat potensi yang dimiliki oleh kerajaan yang tidak hanya berfokus kepada sumber daya alam saja, melainkan pada sumber daya manusia. Hal demikian diharapkan dapat memajukan ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungan kepada sumber daya alam terutama ketergantungan kepada minyak.

Setelah diangkat menjadi Putra Mahkota, Muhammad bin Salman selama kurun waktu dua tahun telah mengadakan kunjungan di banyak negara seperti Amerika Serikat, London, Pakistan, China, India, Mesir, Bahrain, hingga UEA. Kunjungan tersebut merupakan agenda dalam rangka membangun hubungan kerjasama ekonomi yang lebih luas termasuk adanya kesepakatan investasi antara Arab Saudi dengan negara-negara tersebut (Haryadi, 2018).

2.2 Visi Ekonomi 2030 Arab Saudi

Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya yang berupa minyak, sehingga negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi sangat

bergantung kepada penghasilan dari minyak dan hal ini menjadi masalah tersendiri bagi keberlangsungan perekonomiannya. Ketergantungan ini bermula pada saat ditemukannya minyak dan didorong dengan proses komersial yang terjadi pada tahun 1938 dimana hal ini secara cepat mengubah berbagai struktur yang ada didalam negara. Setelah Perang Dunia II, kebutuhan akan minyak mengalami peningkatan empat kali lipat dan lima puluh tahun terakhir telah mencapai 70% dari total konsumsi energi dunia. Pendapatan Arab Saudi disumbang dari sektor minyak sebesar 70% dan Arab Saudi memiliki cadangan minyak sebesar 268 barel, hal ini dinilai cukup besar. Adanya ekspor minyak yang stabil membuat penghasilan Arab Saudi dapat mendukung untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan sekolah (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019)

Kawasan Timur Tengah dinilai strategis secara geografis yang memberikan potensi yang sangat menguntungkan bagi negara-negaranya, salah satunya di kawasan ini terkandung mineral yang melimpah, contohnya seperti: batu bara, besi, tembaga, dan minyak yang menjadi aset terbesar bagi kawasan ini. Adanya ketidakstabilan harga minyak yang sering naik turun dapat mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian di Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Sebagai sumber utama energi dunia, dengan adanya ketidakstabilan harga minyak dunia, hal ini akan sangat mempengaruhi perekonomian global. Hal ini juga sejalan dengan ketergantungan dunia atas minyak bumi sebagai sumber energi yang masih sangat besar. Kondisi krisis politik di Timur Tengah telah menimbulkan banyak kekhawatiran bagi perekonomian global. Hal tersebut karena hampir 65% dari seluruh cadangan minyak bumi berada di Timur Tengah (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).



Gambar 1. Harga Minyak Arab Saudi Tahun 2014 yang mulai mengalami penurunan (*Omar, 2020*)

Pada Juni 2014 harga minyak mengalami penurunan terus menerus, sehingga dengan kejadian ini membuat Arab Saudi menghadapi kenyataan untuk melakukan pembaharuan dalam menghadapi keadaan seperti ini. Pada senin 25 April 2016, Arab Saudi mengumumkan kebijakan ekonomi. Arab Saudi menargetkan pada tahun 2030 mendatang tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak atau fosil yang dapat habis dan memiliki harga fluktuatif. Karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang bisa habis sewaktu-waktu, sehingga hal ini membuat Arab Saudi khawatir terhadap negaranya yang sangat ketergantungan kepada minyak bumi dan Arab Saudi berusaha untuk tidak terlalu mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pendapatan utama negaranya. Adanya visi ekonomi 2030 ini yang akan mengurangi ketergantungan kepada sektor minyak yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki serta meningkatkan layanan masyarakat seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, serta sektor pariwisata. Disamping itu Arab Saudi juga menghadapi banyak tantangan dalam menghadapi perbaikan seperti tingkat pengangguran yang tinggi, urbanisasi yang cepat, populasi yang berkembang, masuknya imigran yang besar-besaran, adanya tanah yang tidak subur, makanan dan juga air (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

2.2.1 Visi Ekonomi 2030: Sebagai Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Arab Saudi

Arab Saudi memiliki banyak masalah yang harus dihadapi dalam sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber daya alam minyak bumi. Dalam menghadapi masalah ekonomi tersebut, Arab Saudi mencanangkan program untuk mengatasi permasalahan ketergantungan terhadap minyak bumi dengan cara “Economic Diversification, Saudi Vision 2030”. Hal ini perlu diadakannya reformasi demi menjaga kestabilan ekonomi Arab Saudi dengan melalui program Saudi Vision 2030.

Minyak bumi yang menjadi sumber pendapatan utama Arab Saudi, dalam program ini pemerintah melihat bahwa kekayaan yang nyata dan sebenarnya adalah sumber daya manusia serta generasi muda yang penuh semangat. Sehingga dengan adanya program ini, Arab Saudi berharap bisa menciptakan ekonomi yang kuat,

berkembang, dan stabil. Dengan memberdayakan dari sektor swasta diharapkan dapat menambah kemitraan dan persaingan pekerjaan yang sehat serta menyediakan kesejahteraan masyarakat Arab Saudi dalam jangka waktu yang panjang (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

Visi 2030 Arab Saudi jangka panjang memiliki 3 pilar penting didalamnya, yaitu:

1. Masyarakat Dinamis (*A Vibrant Society*)

Pada pilar ini, Arab Saudi ingin mengoptimalkan atau memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki. Arab Saudi menyadari bahwa kekayaan alam suatu negara bukan hanya terletak pada sumber daya alamnya melainkan terdapat pada sumber daya manusia juga. Arab Saudi dinilai sebagai jantung dari dunia Arab dan Islam, yang mendorong memperkuat masyarakatnya untuk tetap menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan kuat. Pemerintah juga memprioritaskan, memperkuat, serta melestarikan warisan budaya dan sejarah yang unik selama beberapa generasi. Arab Saudi juga berinisiatif untuk membangun museum budaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan budaya yang tujuannya untuk investasi di dunia pariwisata dan hiburan (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

2. Pengembangan Ekonomi (*Thriving Economy*)

Pada pilar inilah yang menjadi fokus utama visi 2030, seperti yang kita ketahui bahwa minyak dan gas merupakan sumber daya alam utama pendapatan Arab Saudi. Arab Saudi berusaha untuk melepaskan ketergantungannya kepada minyak yang mereka miliki dengan kebijakan-kebijakan baru dan berusaha untuk lebih meningkatkan pendapatan non minyak. Pemerintah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan pekerjaan pada sektor swasta dan membangun ekonomi non minyak untuk masa yang akan datang (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

3. Ambisi Nasional Negara (*An Ambition Nation*)

Pada pilar ini, Arab Saudi sadar untuk lebih mengoptimalkan seluruh jajarannya secara birokrasi. Kerajaan yang memiliki kejelasan terhadap transparansi dan akuntabilitas yang bernilai tinggi. Ambisi nasional negara ini dinilai perlu digunakan untuk mengontrol pemerintahan terhadap proyek visi 2030 Arab Saudi di tahun 2030 yaitu untuk berorientasi pada pengembangan perekonomian Arab Saudi. Fokus utama pemerintah adalah terhadap kasus korupsi yang dapat menghambat

berjalannya program ini, tidak memberikan toleransi terhadap oknum birokrasi yang terlibat kasus korupsi, serta meningkatkan mutu administrasi, transparansi, dan profesional yang ahli (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

Kestabilan perekonomian dan kemakmuran masyarakat Arab Saudi inilah tujuan dari program visi ekonomi 2030. Karena Arab Saudi sangat bergantung kepada minyak yang mereka miliki, tetapi ancaman dan tantangan perekonomian negara juga sangat banyak sekali. Sehingga dengan adanya tantangan dan ancaman ini membuat Arab Saudi berpikir untuk membangun semua aspek yang ada didalam kehidupan masyarakat Arab Saudi yang akan mengandalkan pendapatan ekonomi tidak dari minyak lagi (Citra Nur Hikmah & Abrar, 2019).

2.3 Kebijakan Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020

Menjadi putra mahkota selama beberapa bulan, MBS pada 2018 mengumumkan bahwa Arab Saudi mencabut larangan mengemudi bagi perempuan dan mengizinkan perempuan untuk mengemudi, yang mana hal ini selama puluhan tahun dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini merupakan bagian dari program putra mahkota MBS dalam memodernisasikan Arab Saudi dari berbagai aspek. Setelah peraturan ini diberlakukan, para perempuan Arab Saudi langsung membanjiri jalanan dan mengemudi mengitari jalanan di Riyadh. Dengan adanya kebijakan ini, Arab Saudi juga mengeluarkan surat izin mengemudi (SIM) bagi perempuan yang harus melakukan tes praktik terlebih dahulu untuk mendapatkan SIM. Kemudian pada Agustus 2019, Arab Saudi menghilangkan sistem perwalian sehingga perempuan tidak perlu meminta izin wali untuk bepergian. Hal ini juga menjadikan perempuan bisa menjadi wali untuk anak-anak mereka, mengajukan perceraian, kelahiran, hingga kematian (CNN Indonesia, 2020).

Pada tanggal 18 April 2018, Kementerian Penerangan Arab Saudi mengumumkan membuka bioskop untuk umum di Ibu Kota Riyadh. Pertama kalinya bioskop dibuka di Arab Saudi setelah 35 tahun dilarang karena mendapat tekanan dari kelompok Islamis yang beraliran konservatif dengan alasan untuk menjaga moral. Dengan dibukanya bioskop ini nantinya akan dilakukan proses sensor untuk menjaga moral yang sesuai di Arab Saudi. Selain itu, film-film yang akan ditayangkan diutamakan untuk kalangan anak-anak dan remaja. Kementerian Arab Saudi juga menargetkan akan dibuka bioskop sebanyak 40 gedung di 15 kota di Arab Saudi dalam kurun waktu 5 tahun. Tidak

seperti di tempat publik lain di Arab Saudi, di dalam bioskop tidak akan ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah Arab Saudi berharap dengan beroperasinya bioskop-bioskop ini akan menjadi katalis pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi dan bisa menciptakan kesempatan baru.

Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya perempuan di Arab Saudi diperbolehkan menonton di stadion olahraga. Yang mana pada sebelumnya, Arab Saudi melarang perempuan memasuki arena olahraga karena dilihat dari berbagai aspek dalam agama Islam. Tetapi, dalam kebijakan ini akan diberlakukan peraturan yang ketat seperti memisahkan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat (Hens, 2019).

Tidak hanya membuka bioskop, pemerintah Arab Saudi juga mulai melonggarkan aturan konser musik. Pada 2017, digelar konser besar pertama kali di Arab Saudi dalam 7 tahun terakhir di Jeddah yang digelar oleh musisi Mohammed Abdu. Musisi luar negeri juga sudah diperbolehkan menggelar konser musik di Arab Saudi. BTS, grup asal Korea Selatan membuat sejarah baru dengan menjadi musisi luar negeri pertama yang menggelar konser di Arab Saudi. Mereka tampil pada 11 Oktober 2019 di King Fahd International Stadium di Riyadh (Hens, 2019).

Pemerintah Arab Saudi juga mencabut larangan pada tahun 2017 untuk penggunaan aplikasi Skype, Whatsapp, dan beberapa aplikasi lainnya. Pada sebelumnya Arab Saudi melarang panggilan melalui internet atau *Voice Over Internet Protocol* (VOIP). Adanya peraturan dalam menggunakan internet bisa menjadi pembatas terhadap ruang gerak masyarakat Arab Saudi terutama lingkup dengan dunia luar negeri. Adanya larangan tersebut untuk melindungi masyarakat dari efek negatif yang dapat merugikan kepentingan publik. Tetapi, dengan semakin berkembangnya aplikasi internet membuat perdagangan internasional merasakan imbasnya. Dengan adanya imbas ini membuat pemerintah mencabut larangan tersebut dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi juga menawarkan visa turis untuk pertama kalinya pada 49 negara di seluruh dunia pada September 2019. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata sebagai bagian dari rencana ekonomi 2030 untuk melepas ketergantungan kepada sektor minyak. Untuk wisatawan non-Islam akan dilarang memasuki dua kota suci Islam yaitu Madinah dan Mekah. Wisatawan perempuan tidak diwajibkan menggunakan abaya, sebagai pakaian wajib yang digunakan perempuan Arab

Saudi. Tetapi wisatawan perempuan diminta mengenakan pakaian yang sederhana dan sopan. Pada sebelumnya visa hanya diberikan kepada pekerja asing, peziarah Muslim yang mengunjungi tempat-tempat suci (Mekah dan Madinah), dan pebisnis (Duetsche Welle, 2019).

Pada Oktober 2019, Arab Saudi mengizinkan turis asing yang berbeda jenis kelamin dan belum menikah bisa tinggal satu kamar dalam penginapan atau hotel. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan visa turis untuk keperluan wisata. Sebelum adanya keputusan ini, pasangan berbeda jenis kelamin yang datang ke Arab Saudi yang akan menginap dilarang tinggal dalam satu kamar dan jika sudah menikah juga harus menunjukkan buku nikah terlebih dahulu. Jika tidak bisa membuktikan maka harus bermukim secara terpisah. Upaya pemerintah dalam meringankan aturan soal turis ini dilakukan untuk mendongkrak ekonomi Arab Saudi dari sektor pariwisata (Dayana, 2019).

Pemerintah Arab Saudi juga membangun taman hiburan terbesar, proyek besar ini dimulai pada tahun 2018. Taman hiburan ini akan menyaingi studio Walt Disney di Florida, Amerika Serikat dan diperkirakan akan menjadi taman hiburan terbesar di dunia. Selain membangun taman hiburan, akan ada berbagai fasilitas olahraga trek gunung, petualangan taman safari, serta rekreasi salju dan air (Hens, 2019).

Pada tahun 2020, Arab Saudi tidak mengeluarkan kebijakan modernisasi tetapi Arab Saudi lebih fokus kepada kebijakan untuk mengatasi pandemi covid-19 yang melanda dunia. Karena pandemi covid-19 dianggap lebih mendesak dan perlu untuk segera di tangani khususnya oleh pemerintah Arab Saudi.

BAB III

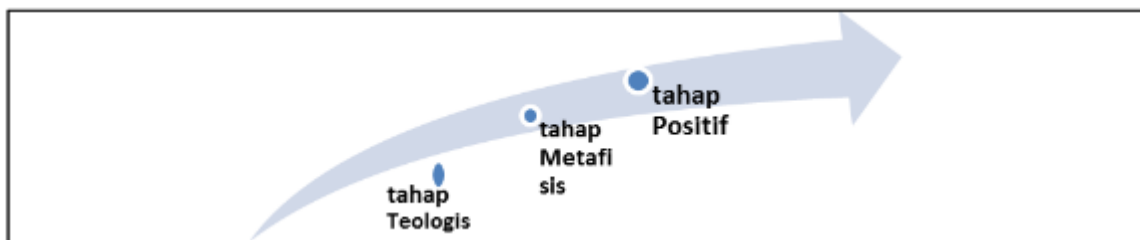
ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA MODERNISASI ARAB SAUDI MENGUNAKAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL AUGUSTE COMTE

Arab Saudi sebagai negara yang menganut kekuasaan monarki, sepanjang periode ini masih tetap bertahan serta kekuasaan rezim Al-Saud sejak tahun 1932 masih berkuasa hingga sekarang. Karena kemonarkiannya ini, banyak pihak yang memberi tantangan bergejolak seperti terjadinya peristiwa Arab Spring. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan di Arab Saudi mengalami perubahan arah kekuasaan menjadi negara yang lebih moderat dibanding dengan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya. Hal ini menjadi langkah baru dan momentum penting yang dicetuskan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman dalam visi ekonomi 2030 untuk melepaskan Arab Saudi dari ketergantungan kepada sektor minyak dan menjadi sebuah tantangan ekonomi bagi Arab Saudi. Visi 2030 Arab Saudi merupakan kerangka yang cukup besar dalam upaya kerajaan Arab Saudi untuk menuju sebagai kawasan yang lebih modern. Terdapat tiga pilar penting dalam visi 2030 Arab Saudi antara lain, masyarakat dinamis (A Vibrant Society), pengembangan ekonomi (Thriving Economy), dan ambisi nasional negara (An Ambition Nation). Hal ini menjadi sebuah kerangka baru sebagai upaya transformasi negara yang tentunya akan mengurangi kenyamanannya negara yang selama ini diterima oleh masyarakat Arab Saudi sendiri, seperti pada beberapa fasilitas negara yang terpengkas akibat turunnya harga minyak dunia (Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan, 2021).

Wacana modernisasi bukan hal yang mudah dilakukan oleh Arab Saudi, karena Arab Saudi memiliki dasar hukum yang bersumber dari hukum Islam dan pendapat para ulama juga sangat mempengaruhi pada keputusan-keputusan dalam pemerintahan Arab Saudi. Dimana beberapa kebijakan-kebijakan baru untuk membuat Arab Saudi menjadi negara yang modern merupakan kebijakan-kebijakan lama yang tidak boleh dilakukan serta menyebabkan terjadinya perubahan sosial mulai dari struktur sosial hingga adanya pola budaya masyarakat dari waktu ke waktu Adapun dari struktur sosial disini merupakan hubungan antara unit-unit sosial, keluarga, atau manusia itu sendiri

Auguste Comte melihat perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan

yang bertahap dan dalam kehidupan suatu masyarakat banyak memiliki unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Comte memiliki pandangan yang rasional dan futuristik mengenai suatu masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya aristokrasi yang turun-menurun dapat digantikan oleh persamaan, kemudian tradisi-tradisi terdahulu dapat digantikan oleh akal budi dan percaya diri. Teori ini memiliki 3 tahap intelektual yang dilalui oleh manusia di sepanjang sejarahnya yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Hukum dari tiga tahap ini yaitu untuk merumuskan perkembangan masyarakat dan individu yang bersifat evolusioner. Dimana kekuatan perubahan sejarah manusia diawali oleh dorongan semangat manusia untuk terus berkembang dan maju melalui pemikiran-pemikirannya (Comte, 1858). Dengan semangat tersebut manusia memahami realitas, serta berasumsi dan membuat metode yang diterapkan dalam upaya menjalankan, memprediksi, hingga mengendalikan kehidupan masyarakat. Hal tersebut terus berkembang di masyarakat hingga mempengaruhi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, hingga militer. Perubahan sosial selalu berubah dari hal yang sederhana ke arah yang lebih kompleks yang selalu berubah dari kehidupan biasa menuju kehidupan modern. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti pola linier yang terdapat pada hukum tiga tahap yang dikemukakan oleh Comte (Comte, 1858).



ar 2. Pola Linier Teori Tiga Tahap (Martono, 2012)

Berikut penjelasan dari pola linier yang dibagi menjadi tiga tahap:

1. Tahap Teologis

Pada tahap ini merupakan tahap paling lama dalam sejarah manusia dimana pada tahap ini dimulai dari kepercayaan masyarakat yang masih memiliki pemikiran dominan mengenai kepercayaan atau masih memiliki pandangan yang primitif terhadap dunia (Comte, 1858). Sebelum adanya visi 2030, Arab Saudi masih menjadi negara yang konservatif dimana kebijakan-kebijakan dilihat dari segi agama Islam, seperti perempuan sangat sulit atau terbatas untuk melakukan berbagai kegiatan

kecuali dengan izin ataupun didampingi oleh wali. Hal ini karena pemerintah Arab Saudi melihat dari segi agama dimana jika perempuan melakukan berbagai hal tanpa izin wali akan banyak menimbulkan keburukan. Kemudian, pemerintah MBS membuat langkah dengan agenda visi 2030 untuk mengurangi ketergantungan ekonomi kepada sektor minyak yang harganya tidak stabil. Visi 2030 ini akan mentransformasi perekonomian Arab Saudi kearah yang lebih modern serta terbuka pada dunia (Wafi, 2018).

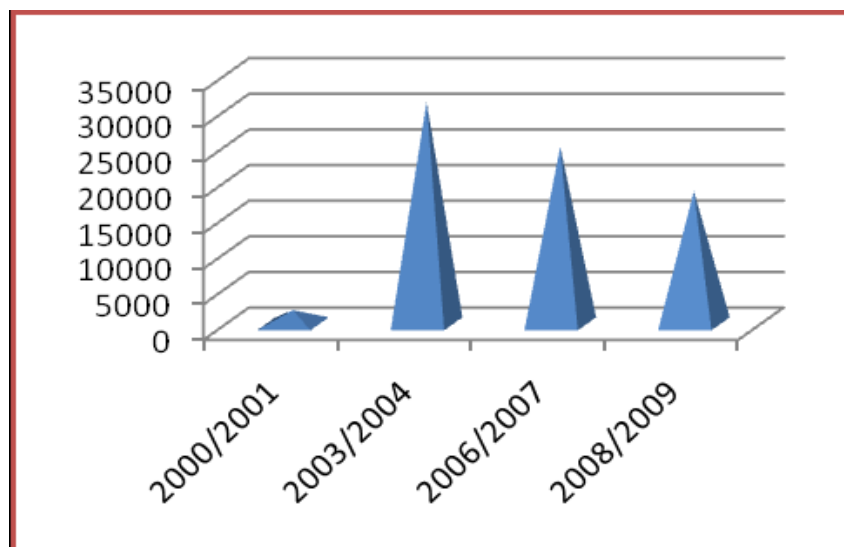
Ketika pada masa pemerintahan Raja Abdullah masih ada permasalahan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Arab Saudi. Sesuai dengan konsep dari Mansour Fakih (Fakih, 2006), bahwa ketidakadilan gender terbagi menjadi berbagai jenis antara lain marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotip, kekerasan, beban kerja, hingga diskriminasi. Semua bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi secara baik sehingga laki-laki dan perempuan akhirnya terbiasa dan yakin bahwa peran gender tersebut seakan-akan merupakan kodrat. Dimana kaum perempuan ditempatkan pada posisi marginal yang berkembang di masyarakat (Hardiwidjaja, 2007). Proses marginalisasi merupakan sebuah proses pembatasan dari satu jenis kelamin tertentu (perempuan). Marginalisasi disebabkan oleh perbedaan gender, jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme proses (Fakih, 2006). Dari segi sumber misalnya, marginalisasi atau pembatasan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, kepercayaan, tafsir agama, adat istiadat, dan perkiraan ilmu pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak hanya di lingkup rumah tangga saja, tetapi dapat terjadi di tempat kerja, masyarakat atau budaya, hingga negara (Mega Hardiyanti & Sri Yuniati, 2021).

Contoh marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Arab Saudi salah satunya yaitu tidak diizinkan keluar rumah termasuk bekerja. Hal ini sudah diterapkan sejak lama oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi melarang perempuan bekerja karena tunduk pada adat dan budaya yang sudah tertanam disana. Sekalipun perempuan diperbolehkan bekerja dan sudah mendapatkan izin dari wali atau suami, perempuan yang bekerja dianggap memberi nafkah tambahan bagi keluarga sehingga perempuan dan laki-laki memiliki gaji yang berbeda.

Kemudian, perempuan di Arab Saudi juga mengalami subordinasi di bidang politik. Selama pemerintahan Raja Abdullah mulai tahun 2005 hingga tahun 2015,

kaum perempuan dipinggirkan dalam hal politik termasuk tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemilu baik sebagai kandidat maupun peserta pemilu. Kaum perempuan dianggap irasional dalam berpikir, emosional, dan tidak bisa menjadi pemimpin akibatnya kaum perempuan diposisikan pada tempat yang tidak penting. Adanya segregasi gender membuat kaum perempuan berada dalam pengawasan kaum laki-laki. Pelabelan negatif atau stereotip yang diletakkan kepada perempuan di Arab Saudi berakibat merugikan perempuan (Mega Hardiyanti & Sri Yuniati , 2021).

Perempuan di Arab Saudi juga mengalami diskriminasi pada bidang pendidikan. Masyarakat Arab Saudi memandang pendidikan tidak begitu penting, khususnya bagi perempuan. Karena tujuan pendidikan untuk perempuan pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu yang baik (Yahya Al Alhareth, Ibtisam Al Dighrir, & Yasra Al Alhareth, 2015). Sehingga, mulai tahun 2009, kaum perempuan banyak yang lebih memilih untuk putus sekolah. Kaum perempuan di Arab Saudi masih tunduk pada aturan tradisional disana serta adanya pandangan yang masih kuno untuk kaum perempuan di Arab Saudi.



Gambar 3. Pendaftaran perempuan Arab Saudi untuk gelar sarjana di universitas tahun 2000-2009 (Yahya Al Alhareth, Ibtisam Al Dighrir, & Yasra Al Alhareth, 2015)

2. Tahap Metafisik

merupakan tahap yang menjadi fase transisi dari tahap teologi menuju tahap positif. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia mengenai

hukum-hukum alam yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis hingga *universal* (Comte, 1858). Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan di Arab Saudi yang tidak bisa lepas dari situasi sosial, politik, budaya, ekonomi, hingga agama (Bolo, 2019). Dalam kehidupan sosial, tujuan utama masyarakat diperkuat dengan adanya peningkatan produksi. Artinya tahap ini merupakan masa transisi dari masyarakat yang primitif menuju industri. Pada tahun 1983, perusahaan Amerika Serikat Chevron menemukan minyak di bawah gurun pasir di Arab Saudi dan selama terjadinya Perang Dunia II, produksi minyak bumi sangat berkembang pesat. Tetapi, pendapatan besar dari sektor minyak terjadi pada tahun 1973-1974 ketika dunia barat sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan dari peperangan antara Arab Saudi dan Israel (EIA (Energy Information Administration), 2005). Pada waktu itu, negara-negara di Timur Tengah telah bergabung dalam OPEC serta melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat dan kepada negara-negara barat yang mendukung Israel. Adanya embargo ini, harga minyak dunia mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu empat kali lipat dari harga normalnya. Sebagai negara yang memiliki ladang minyak sangat besar, Arab Saudi memilih jalan untuk mengeksport minyak bumi tersebut dan menjadi penghasil minyak terbesar dalam urutan ke dua di dunia.

Ditemukannya minyak di Arab Saudi serta efek dari adanya embargo minyak kepada negara barat membuat Arab Saudi menjadi negara yang memiliki pendapatan nasionalnya lebih besar bergantung penuh kepada minyak serta investasi luar negeri dan sebagian kecilnya berasal dari pajak negara serta retribusi. Ketergantungan tersebut disebabkan adanya dorongan komersial dan penemuan minyak pada tahun 1983. Sehingga, hal tersebut banyak mengubah struktur di Arab Saudi. Dengan stabilnya dari ekspor minyak, membuat Arab Saudi memiliki penghasilan yang cukup besar dan digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan, seperti rumah sakit, jalan, bandara, sekolah, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya. Kemudian setelah Arab Saudi mendapat jaminan dan dukungan dari Amerika Serikat, membuat hubungan dua negara tersebut kembali dekat serta saling ketergantungan antara minyak, keamanan, hingga Islam. Dimana Amerika Serikat membutuhkan minyak dan Arab Saudi membutuhkan dukungan politik dari Amerika Serikat.

Kemudian adanya fluktuasi harga minyak yang membuat Arab Saudi

terguncang, sehingga mempengaruhi kestabilan perekonomian Arab Saudi serta mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Kemudian pada tahun 2014, harga minyak mengalami penurunan terus-menerus yang menyebabkan Arab Saudi harus mencari solusi atau alternatif lain untuk menangani masalah tersebut. Karena ekonomi Arab Saudi sangat bergantung kepada sektor minyak yang merupakan sumber daya alam yang dapat habis sewaktu-waktu (Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan, 2021).

3. Tahap Positif

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial dari Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa *intelengensi* manusia. Pada tahap positif, masyarakat sudah mulai percaya dengan adanya data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir sebagai yang bersifat sementara. Akan tetapi dengan melalui analisis sosial dapat memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia bisa maju dan berkembang (Comte, 1858). Dalam kehidupan sosial, manusia diharuskan mampu menerapkan dan memanfaatkan akal pikirannya untuk menguasai lingkungan alam bagi kemajuan masa depan yang lebih baik. Masyarakat disini adalah masyarakat industri dimana relasi-relasi mereka merupakan bentuk dari dasar industrial (Chabibi, 2019).

Sehingga dengan adanya Visi 2030 ini akan menjadi kumpulan ambisi dan target khusus untuk diversifikasi dan untuk meningkatkan daya kompetisi. Terdapat beberapa keunikan tersendiri pada kebijakan yang berhubungan dan di indikasikan pada sebuah kesediaan untuk merubah larangan pada kebijakan tradisional. Hal ini, telah disyaratkan oleh MBS dengan investasi politik skala besar yang belum pernah terjadi pada reformasi generasi keluarga kerajaan sebelumnya. MBS mengadopsi sebuah sifat yang baru dimana ia mengkritik negara yang telah kecanduan dengan minyak dan akan membuat Arab Saudi hidup tanpa ketergantungan kepada minyak. Hal ini berkebalikan dengan kebijakan-kebijakan raja-raja sebelumnya yang lebih fokus kepada minyak dari pada sumber daya alam lainnya. MBS juga telah mengambil langkah yang terkonsentrasi pada pembuatan kebijakan ekonomi dalam satu genggam serta meyakinkan perputaran pada menteri ekonomi dan menutup hukum. Pemerintah Arab Saudi secara bertahap atau secara perlahan melakukan

perubahan-perubahan kebijakan untuk membuat Arab Saudi menjadi negara yang modern dan tidak bergantung kepada sektor minyak. Selain itu, beberapa fasilitas negara yang selama ini dinikmati masyarakat Arab Saudi harus terpangkas akibat jatuhnya harga minyak dunia (Rosida, 2018). Anggaran pembelanjaan negara juga mengalami penurunan hampir 10%. Selain dari gejolak turunnya harga minyak dunia yang semakin menipis tiap tahunnya, pengaruh konstelasi perpolitikan Arab Saudi serta demografi penduduk Arab Saudi yang setengahnya berusia produktif menjadi penyebab problematika Arab Saudi yang tidak kunjung selesai. Hal ini, dengan adanya visi 2030 mampu mengatasi permasalahan ekonomi dengan cara yang lebih modern (Rosida, 2018).

Adapun beberapa kebijakan untuk mereformasi sektor sosial dalam visi 2030 yang dianggap akan membawa pengaruh yang cukup besar yaitu kebijakan untuk perempuan. Kebijakan tahun 2017-2019 yang mendukung terwujudnya visi 2030 serta untuk mengurangi permasalahan kesetaraan gender di Arab Saudi, antara lain:

- a. Pada tahun 2017 pemerintah Arab Saudi menunjuk Sarah Al Suhaimi sebagai Kepala Bursa Saham Arab Saudi yang baru dan menjadi sejarah perempuan pertama yang menjadi pemimpin bursa saham Arab Saudi. Pada bulan Mei 2017, untuk pertama kalinya perempuan bisa pergi ke dokter dan mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tanpa memerlukan pendamping atau wali laki-laki. Kemudian, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program transportasi baru bernama Wusool yang dirancang khusus untuk pekerja perempuan (Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi, 2021). Mayoritas pekerja perempuan dari sektor tersebut menjadi fokus utama pemerintah Arab Saudi untuk mendorong perempuan supaya memasuki ketenagakerjaan.
- b. Pada tahun 2018 keluarga-keluarga di Arab Saudi dapat memasuki gelanggang olahraga di tiga kota besar yaitu Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dan tidak mengecualikan perempuan untuk turut menonton pertandingan olahraga. Abdul Rahman Al-Hussein selaku Kementerian Perdagangan dan Investasi Arab Saudi, menyatakan dalam laman resmi pemerintah Arab

Saudi bahwa perempuan boleh meluncurkan usahanya sendiri dengan bebas dan mendapatkan layanan elektronik pemerintah tanpa memerlukan bukti izin dari wali mereka (Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi, 2021).

Selanjutnya salah satu kebijakan pada tahun 2018 yang paling signifikan adalah dengan diperbolehkannya perempuan Arab Saudi untuk menyetir dan mengendarai kendaraan pribadinya secara legal. Kebijakannya ini sudah disampaikan dari tahun 2017 tetapi baru diresmikan pada tahun 2018.

- c. Pada tahun 2019 Kementerian Administrasi Perkotaan dan Pedesaan (*Ministry of Municipalities and Rural Affairs*) menyatakan bahwa restoran-restoran di Arab Saudi tidak lagi memerlukan pintu masuk yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Pada bulan Agustus 2019 diperbolehkannya perempuan berumur diatas 21 tahun untuk bepergian (*Travelling*) tanpa izin resmi dari wali laki-lakinya. Kemudian, Ahmed Al-Khatib selaku Kepala Dinas Pariwisata dalam sebuah interview resmi mengumumkan bahwa abaya atau jubah tidak lagi diharuskan untuk wisatawan perempuan, tetapi tetap mengharuskan pakaian yang sopan termasuk di area pantai (Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi, 2021).

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi 2030 Arab Saudi dan mengurangi adanya ketidaksetaraan gender di Arab Saudi. Karena perempuan merupakan makhluk yang rasional dan mampu berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralitas maksimalnya, dimana perempuan Arab Saudi sudah mulai merdeka atau setara dengan laki-laki dan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik dan tidak tersingkirkan dalam ruang privat di rumah dan keluarga seperti yang terjadi sebelumnya, dengan adanya kebijakan ini perempuan mulai dicanangkan dalam rangka pencapaian visi 2030 Arab Saudi (Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi, 2021). Adapun manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: Dengan dibukanya bioskop diharapkan dapat menambah pemasukan negara cukup banyak. Karena melihat dari banyaknya minat masyarakat Arab Saudi ingin menonton film hingga rela bepergian

keluar negeri untuk menonton film di bioskop. Hal ini membuat Arab Saudi merasa banyak mengeluarkan uang untuk negara lain, sehingga dengan adanya bioskop di Arab Saudi masyarakat tidak perlu pergi keluar negeri hanya untuk menonton film.

Semenjak dibukanya bioskop di Arab Saudi, pembangunan-pembangunan untuk sarana pemutaran film kini gencar dilakukan. Terkait hal tersebut, Arab Saudi diperkirakan akan mengeluarkan dana sekitar 5 Miliar Riyal Saudi (SR) atau sekitar Rp 18 Triliun untuk membangun bioskop-bioskop baru di Arab Saudi selama tahun 2020. Pada tahun 2020 direncanakan akan dibangun 140 bioskop dan akan dibuka di 30 mall di seluruh kerajaan Arab Saudi, hal ini diperkirakan akan menciptakan lebih dari 5.300 peluang kerja. Industri cinema Arab Saudi akan melihat pertumbuhan yang luar biasa dan diharapkan akan menjadi pemimpin di kawasan tersebut yang telah mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan di seluruh dunia (MOESLIM CHOICE, 2020). Hal ini merupakan salah satu langkah untuk memenuhi tujuan visi 2030 Arab Saudi yaitu untuk melakukan diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan wisata, serta meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk bisnis hiburan domestik dari 2,9% menjadi 6% dari total pengeluaran. Mengingat banyak warga Arab Saudi menghabiskan sekitar 30 miliar dolar AS (Rp 408,3 triliun) pertahun untuk pariwisata dan hiburan di luar Arab Saudi khususnya untuk menonton film (Adiwijaya, 2020). Tidak hanya itu saja perusahaan Meksiko, Cinepolis berencana akan membuka 200 bioskop di Arab Saudi dalam dua tahun mendatang. Cinepolis baru-baru ini membuka dua bioskop di kota Dammam dan Jeddah di Arab Saudi sebagai bagian dari visi 2030 Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan kepada minyak. Al-Hokair Group Arab Saudi menjalin kerjasama dengan mitra regional di Uni Emirat Arab, Al-Tayer Group dan akan menginvestasikan USD 300 juta selama lima tahun untuk mengoperasikan bioskop di seluruh kerajaan (Syarifudin, 2021).

Menurut laporan perusahaan akuntansi multinasional PwC. Industri perfilman membutuhkan standar kebebasan berekspresi yang tinggi dari mulai menampilkan perempuan hingga kebebasan membahas topik yang berbeda. Oleh karena itu peran perempuan untuk mendorong kesuksesan visi 2030 Arab Saudi sangat penting salah satunya pada bidang perfilman yang sangat membutuhkan aktor perempuan untuk dapat mempromosikan baik dari kebudayaan maupun kehidupan

Arab Saudi kepada dunia. Bioskop juga merupakan kekuatan lunak yang dapat membuka jalan bagi keberhasilan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung di Arab Saudi (Iswara, 2022).

Kembali pada September 2019, Arab Saudi memperbolehkan pembuatan visa dengan tujuan wisata yang sebelumnya hanya diperbolehkan bagi jamaah haji dan umroh, pekerja serta pebisnis. Arab Saudi juga membuka visa on arrival yang mendatangkan 24.000 wisatawan asing terhitung sejak 10 hari setelah diumumkan terkait pembuatan visa untuk wisata tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi salah satu tujuan dalam yang terdapat dalam visi 2030 Arab Saudi yaitu meningkatkan angka sektor wisata ini sekitar 10% pada GDP negara yang saat ini masih berada di angka 3%. Beberapa proyek yang telah disiapkan oleh Arab Saudi adalah *Red Sea Project* dan *Qiddiya* (Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya, 2021). Selain kedua proyek tersebut dapat memberikan peluang investor dan mendatangkan turis, kedua proyek tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat Arab Saudi. Salah satu kerjasama yang terbentuk dalam proyek ini adalah Arab Saudi bekerjasama dengan Hyatt Hotels yang merupakan salah satu perusahaan perhotelan multinasional Amerika Serikat yang mengelola hotel mewah dan tempat-tempat wisata. Kemudian untuk mendukung visi 2030 Arab Saudi, Hyatt Regency Riyadh Olaya mengumumkan kemitraan dengan *Hotel and Touris Management Institute Switzerland* yang merupakan perusahaan yang memberikan *Education for Employment* (EFE) dalam upaya untuk mendukung visi 2030 Arab Saudi dan akan mensponsori pelatihan calon pekerja perempuan pada hotel-hotel yang akan dibangun dan juga pada proyek besar Arab Saudi, *Red Sea Project*.

Masih banyak lagi alternatif untuk pemasukan baru Arab Saudi yang bukan berasal dari minyak setelah adanya visi 2030 Arab Saudi ini. Selain sektor pariwisata yang merupakan proyek besar visi 2030 Arab Saudi, Pangeran MBS juga mengundang *boyband* BTS yang berasal dari Korea Selatan untuk mengadakan konser. Dengan tiket konser sebanyak 70.000 terjual habis pada 11 Oktober 2019 lalu di Stadium Internasional King Fahd. Konser ini merupakan pertama kalinya perempuan dapat masuk kedalam stadium dan juga konser pertama dengan artis yang berasal dari negara lain. Adanya keterbukaan Arab Saudi merupakan salah satu

langkah besar yang nantinya dapat terus menstabilkan perkembangan Arab Saudi, khususnya dalam perekonomian. Beberapa strategi MBS yang sudah berjalan ini merupakan salah satu bukti bahwa memodernisasi negara dengan melonggarkan kebijakan yang ada bukanlah suatu hal yang buruk dan justru dapat mendukung Arab Saudi untuk mengembangkan dan memajukan negaranya. Setelah 4 tahun berjalan dari tahun 2017 hingga 2020, akses terhadap data untuk melihat progres visi 2030 Arab Saudi cukup terbatas namun, beberapa perkembangannya dapat dilihat dari progres yang terlihat saja. Terlepas dari progress kecil yang diberikan pada data tersebut, Arab Saudi masih memiliki banyak peluang lain yang telah direncanakan dalam visi 2030 Arab Saudi meskipun belum terlihat. Selain itu, visi 2030 Arab Saudi juga telah memberikan Arab Saudi banyak peluang kerjasama dengan negara lain dan salah satunya adalah Amerika Serikat yang menjadi partner dalam beberapa pembangunan proyek besar pada visi 2030 Arab Saudi (Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya, 2021).

Kemudian masyarakat Arab Saudi perlahan sudah menggunakan teknologi modern pada sebagian besar produksinya. Sektor-sektor ekonomi berkembang lebih cepat dimana sektor-sektor baru akan menggantikan sektor-sektor lama yang mengalami kemunduran. Adanya program visi 2030 ini, diharapkan dapat membuat Arab Saudi jauh lebih mandiri dari sektor ekonomi dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan negara pada sumber daya alam khususnya minyak yang suatu saat bisa habis dan akan menjadi *boomerang* bagi Arab Saudi sendiri. Pada tahap ini, Arab Saudi sudah banyak membuat kebijakan-kebijakan baru dari berbagai aspek untuk mendukung program visi 2030, seperti dibukanya bioskop yang merupakan inti program pemerintah untuk mendorong dan mengapresiasi budaya lokal yang terbuka serta memperkaya kebudayaan masyarakat. Kemudian, perempuan Arab Saudi juga sudah diperbolehkan mengendarai mobil, mulai masuk ke ranah politik dan menjadi pemimpin, serta adanya kebijakan penghapusan perwalian untuk perempuan. Hal ini membuat perempuan Arab Saudi mampu berkontribusi terhadap negara serta bisa membantu ekonomi keluarga. Adanya kebijakan ini, *dealer* mobil mengalami kenaikan permintaan serta bioskop menjadi banyak peminat dengan dihapuskannya perwalian untuk perempuan yang membuat perempuan semakin bebas untuk melakukan segala kegiatannya (Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan,

2021).

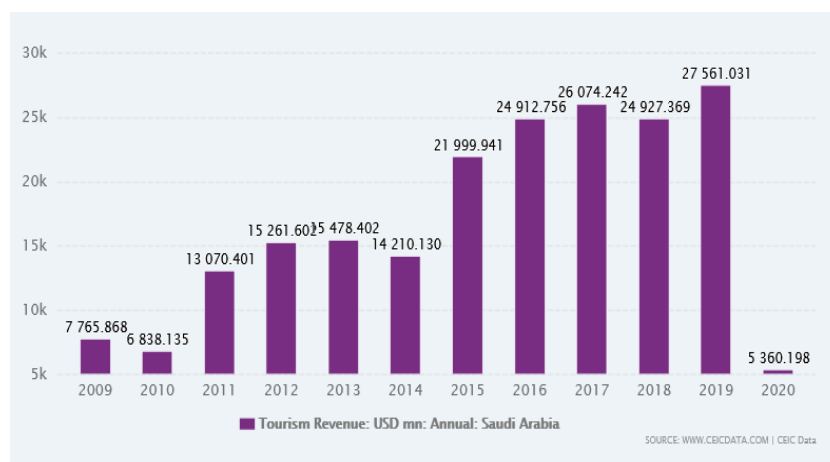
Seperti yang terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi covid-19 menyerang dunia dengan sangat cepat, sehingga perekonomian dunia hampir mengalami hibernasi karena *lockdown*. Hal ini berdampak signifikan terutama pada yang paling rentan yaitu negara dan masyarakat. Akibatnya ekonomi Arab Saudi terkena dampak yang signifikan karena pandemi covid-19 dan hampir masuk ke hibernasi ekonomi. Pasar minyak terkena dampak negatif dimana pendapatan dari minyak turun secara signifikan. Berbagai negara di dunia PDB mereka turun sebesar 5%, 10%, bahkan ada yang mencapai penurunan sebesar 20%. Hal ini pada dasarnya menempatkan beberapa negara kesepuluh tahun ke belakang dalam hal pertumbuhan. Mereka kehilangan 10 tahun PDB mereka karena pandemi covid-19 ini. Hal seperti ini harus melihat bagaimana respon para pemimpin dunia menanggapi dengan sangat cepat. Karena dunia belum pernah melihat respons seperti ini bahkan setelah Perang Dunia II maupun setelah krisis keuangan pada tahun 2008 (Subarkah, 2020).

Dengan adanya kondisi ekonomi seperti itu, dengan adanya visi 2030 Arab Saudi merupakan usaha yang efektif dan cepat dalam menangani pandemi covid-19 di Arab Saudi dari posisi yang kuat. Karena visi ini untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak dan pada kondisi pandemi seperti ini minyak mengalami banyak penurunan. Sehingga Arab Saudi tidak terlalu terpuruk seperti negara-negara lain karena program untuk visi 2030 tersebut sudah banyak yang berjalan, meskipun ekonomi Arab Saudi juga mengalami penurunan. Sektor-sektor yang menjadi fokus Arab Saudi seperti hiburan, pariwisata, olahraga hingga teknologi. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang kuat sepanjang tahun 2019 antara 3% hingga 8% (Subarkah, 2020).

Seperti yang terjadi sebelum adanya covid-19, Arab Saudi sudah melakukan program visi 2030 seperti dibukanya bioskop pada tahun 2018 dan disusul bioskop ke dua pada tahun 2019 yang diberi nama bioskop AMC yang memiliki 7 layar lebar dan 750 kursi untuk penonton dan terdapat sejumlah resto makanan yang menyediakan makanan untuk para pengunjung bioskop. Desain dari bioskop AMC ini sudah memiliki kualitas dunia dan untuk menunjukkan Arab Saudi sebagai negara yang berbeda dari sebelumnya. Bioskop AMC ini berlokasi di Riyadh dan didirikan atas kolaborasi antara pembangunan dan investasi perusahaan hiburan yang merupakan

anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dana investasi publik dan jaringan bioskop Amerika Serikat (TEMPO.CO, 2019). Pada tahun 2020 ketika pandemi covid-19 menyerang dunia, bioskop di Arab Saudi sempat ditutup namun beberapa saat kemudian dibuka lagi sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini untuk memulihkan ekonomi Arab Saudi yang sempat terpuruk karena covid-19.

Kemudian Arab Saudi juga melakukan kebijakan dari sektor pariwisata dengan menawarkan visa turis untuk pertama kalinya sebagai bagian dari menghidupkan perekonomian di sektor pariwisata. Arab Saudi membuka visa untuk 49 negara termasuk Amerika Serikat hingga negara-negara Eropa dan Australia. Sebelumnya visa bagi warga asing di Arab Saudi hanya untuk pekerja asing dan para peziarah muslim saja (Perdana, 2019).



Gambar 4. Pendapatan Pariwisata Arab Saudi (CIEC DATA, 2020)

Pendapatan pariwisata Arab Saudi dilaporkan sebesar 5 USD pada tahun 2020. Rekor ini turun dibandingkan tahun sebelumnya 27 USD pada tahun 2019. Data pendapatan pariwisata Arab Saudi dari tahun 2004 hingga 2020 dengan rata-rata mencapai 13 USD (CIEC DATA, 2020). Pada tahun 2019 untuk program pemerintah dari sektor pariwisata dianggap cukup sukses dengan memberikan visa turis asing. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 dan adanya sejumlah kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi interaksi sosial serta dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Kemudian karena hal ini, terdapat program dari pemerintah pada sektor pariwisata yaitu *staycation* mulai banyak diminati pada saat banyaknya kebijakan untuk pandemi covid-19, bahkan *staycation* ini sekarang

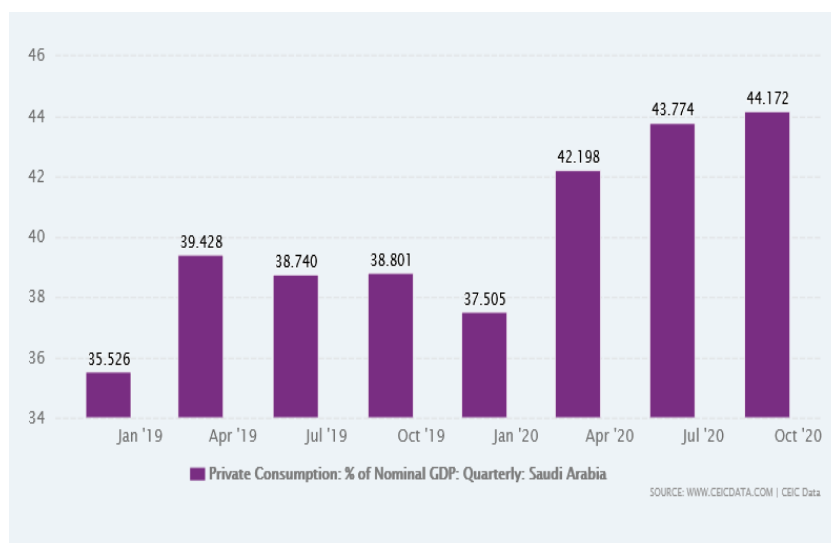
menjadi tren bagi masyarakat Arab Saudi serta menjadi salah satu program MBS yang hasilnya cukup signifikan dalam memberikan pemasukan ekonomi negara. Dalam hal ini, Arab Saudi menginginkan negaranya bisa lepas dari ketergantungan kepada minyak melalui program-program tersebut.

Setelah banyaknya kebijakan-kebijakan modernisasi diatas, cara hidup masyarakat Arab Saudi mengalami perubahan setelah MBS mengumumkan tentang visi 2030, dimana dengan banyaknya kebijakan-kebijakan baru membuat konsumsi masyarakat dari selain sektor kebutuhan pokok meningkat tajam, mulai dari bidang investasi, liburan ketempat-tempat yang populer maupun yang tenang, hingga pada sektor hiburan seperti bioskop, konser-konser musik serta menonton pertandingan sepak bola. Banyak konsumsi masyarakat yang tinggi ini membuat pemerintah harus banyak menyediakan permintaan-permintaan masyarakat seperti hotel, restoran hingga tempat hiburan terutama bioskop yang memiliki peminat cukup banyak setelah puluhan tahun ditutup (Hasugian, 2018).

kemudian pada masa pandemi, pemerintah Arab Saudi sedang melebarkan sayap ekonominya pada bidang lain yaitu *staycation*. Sejak kepemimpinan MBS yang mencetuskan adanya visi 2030 Arab Saudi yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi ingin merubah kebijakan ekonominya menjadi ekonomi pasar bebas dan mendominasi di sektor pariwisata yang menjadi ekonomi haluan baru di negaranya. Staycation merupakan salah satu keberhasilan visi 2030 Arab Saudi yang dimulai sejak tahun 2018. *Staycation* bisa dikatakan sebagai bentuk liburan dalam hotel yang mewah dengan disediakan berbagai fasilitas yang modern. Jadi staycation identik dengan liburan yang menetap pada satu tempat tertentu. *Staycation* menjadi terobosan terbaru untuk membatasi adanya kontak sosial di masa pandemi dan dapat menjadi solusi utama liburan yang menarik di era transisi pandemic covid-19 dan menjadi *tren* terbaru bagi perekonomian Arab Saudi. *Staycation* melonjak naik setelah pemerintah Arab Saudi mengizinkan masyarakatnya bepergian ke luar negeri dan mengizinkan warga asing masuk ke Arab Saudi. Pada bulan Mei lonjakan belanja konsumen pada bidang *staycation* mencapai 70% dan pada bulan Juli naik cukup banyak yaitu 14,7% dengan jumlah 96,7%. Peningkatan ini sangat menarik dan menguntungkan bagi Arab Saudi (Cahayani, 2021).

Staycation bukan hanya untuk wisatawan domestik tetapi juga untuk wisatawan

internasional. *Staycation* menawarkan cara berlibur yang berbeda dan cukup asyik yang mampu mengobati kerinduan masyarakat untuk berlibur pada saat pandemi covid-19. Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 43% dari ekonomi Arab Saudi pada tahun 2020. Kenaikan tersebut menawarkan ketenangan bagi Arab Saudi karena telah menunjukkan pemulihan dua kali lipat dari ekonomi yang terpukul pandemi tahun 2019 serta rendahnya permintaan minyak. Restoran, kafe, bioskop, hotel-hotel terisi penuh di ibu kota Riyadh serta tempat-tempat baru terus bermunculan yang karena adanya pelanggaran bertahap dari aturan ketat yang mengatur kehidupan publik. Di restoran milik Burke, salah satu restoran yang ia rencanakan untuk dibuka di Arab Saudi banyak staf wanita dan pria muda berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut sementara seorang pemain perkusi wanita menemani seorang DJ. Pemandangan tersebut tidak dapat dibayangkan dalam satu dekade yang lalu (Newswire, 2021).



Gambar 5. Konsumsi Pribadi Masyarakat Arab Saudi (CEIC Data, 2021)

Konsumsi pribadi dari PDB Arab Saudi dilaporkan sebesar 44,1% pada Oktober 2020. Rekor ini naik dibandingkan bulan Juli 2020 yaitu sebesar 43,7%. Data konsumsi pribadi dari PDB Arab Saudi sempat mengalami penurunan cukup banyak pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar 35,5% karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam berinteraksi (CEIC Data, 2021).

Menurut Auguste Comte perubahan sosial itu bertahap mulai dari masyarakat yang sangat primitif terhadap hal-hal yang baru dan dianggap akan menghilangkan nilai-

nilai kebudayaan. Kemudian dengan adanya visi 2030 yang diumumkan oleh putra mahkota MBS, pada mulanya masyarakat Arab Saudi kebanyakan tidak menyetujui karena alasan dari segi ajaran Islam. Namun, setelah perlahan masyarakat mulai menerima terutama ketika adanya kebijakan untuk perempuan yang boleh mengendarai mobil sendiri dan dihilangkannya hak wali bagi perempuan, kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang mendukung perempuan untuk lebih bebas dalam menyalurkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian masyarakat Arab Saudi mulai memiliki pandangan yang terbuka terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi mulai melakukan peningkatan-peningkatan pada sektor-sektor dari programnya. Seperti pada sektor budaya dan sosial dengan membuka bioskop yang kemudian diminati banyak kalangan masyarakat Arab Saudi. Selanjutnya Arab Saudi mulai mencari investor-investor serta menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dari sektor ini. Dengan melihat kondisi sosial di Arab Saudi yang diketahui secara umum, Arab Saudi merupakan negara Islam yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar konstitusinya. Hal ini menjadikan ulama-ulama Wahabi memiliki peran dan terlibat dalam pemerintahan Arab Saudi. Ideologi konservatif ini telah melekat di Arab Saudi cukup lama, sehingga hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi dalam merubah Arab Saudi menjadi negara yang modern (Wafi, 2018).

Jika sebuah norma sosial berubah, secara otomatis kekuatan elite akan ikut berubah dan para ulama Wahabi melihat ketersediaan kerajaan dalam mengadopsi beberapa pembaharuan atau modernisasi sebagai sebuah pelanggaran atas pakta yang telah ditetapkan antara ulama Wahabi dengan keluarga kerajaan Arab Saudi. Hal ini akan menjadi bahaya yang besar yang akan terjadi terhadap beberapa kaum agamawan dan elite, sehingga Arab Saudi harus sangat berhati-hati dalam melakukan program modernisasi. Selain itu, karena sistem hukum Arab Saudi yang bersandar pada hukum syariah atau hukum Islam, dimana kekuatan ulama sangat mempengaruhi dalam membuat keputusan yang penting serta membentuk dan mencetak norma sosial, adat, dan kebiasaan. Dengan adanya modernisasi ini banyak beberapa kebijakan yang bertentangan dengan paham para ulama (Rosida, 2018).

Konsep kontrak sosial Arab Saudi terdiri dari kelompok gabungan yang secara implisit terdiri dari berbagai macam institusi, mulai dari keluarga kerajaan Arab Saudi,

ulama-ulama, ketua suku, kaum bisnis, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang membuat suatu keputusan untuk membentuk negara. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi pemegang atau subjek utama dalam perubahan. Di Arab Saudi, peran para ulama sangat penting terutama dalam persoalan negara yang kemudian terkonsentrasi pada sistem pendidikan dan hukum khususnya mengenai isu keluarga (Rosida, 2018). Keluarga Al-Saud mengawasi urusan keamanan, urusan luar negeri, dan beberapa aspek ekonomi. Kaum elite politik Arab Saudi masih memperhatikan beberapa poin yaitu dengan masih tetap mempertahankan kehendak kaum agamawan dan tetua adat untuk tetap menjaga stabilitas kekuasaannya. Sedangkan pemerintah Arab Saudi harus lebih berhati-hati dalam memodernisasikan negara supaya tidak terlampau jauh yang dapat menjadikan Arab Saudi menjadi negara yang liberal karena dengan adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya yang cukup banyak. Hal ini dikhawatirkan akan adanya pemaksaan besar terhadap perubahan Islam sebagai ideologi negara. Pemerintah Arab Saudi harus mengupayakan keseimbangan antara sistem modernisasi dan budaya konservatif negara agar tercipta stabilitas kerajaan seperti yang sudah dinikmati selama puluhan tahun (Rosida, 2018).

Diantara terobosan modernisasi Arab Saudi pada sektor sosial, selain ruang publik bagi perempuan yang di inisiasi oleh pihak kerajaan adalah pemberian lisensi bagi industri bioskop untuk beroperasi yang direalisasikan pada Mei 2018. Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi mengatakan bahwa adanya kebijakan ini sebagai bagian dari agenda reformasi sosial dan ekonomi dalam visi 2030 dibawah kepemimpinan MBS. Dibukanya gedung bioskop ini merupakan salah satu program pemerintah Arab Saudi untuk mendorong dan mengapresiasi budaya lokal yang terbuka serta memperkaya kebudayaan masyarakat Arab Saudi (Wafi, 2018). Tetapi dalam masyarakat Arab Saudi sendiri terdapat pro dan kontra mengenai modernisasi di Arab Saudi. Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Arab Saudi yaitu bagaimana mereka beradaptasi dengan modernisasi tersebut terutama dalam mengimplementasikan Islam sebagai agama yang moderat. Sebagian masyarakat Arab Saudi mengalami *culture shock* karena kondisi ini serta adanya ketidaksetujuan dari para ulama karena hal ini anggap lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya.

Adanya program modernisasi dari pemerintah, perubahan sosial masyarakat tidak dapat dihindari karena merupakan suatu proses alami manusia yang akan

senantiasa hidup berkembang dan dinamis serta bukanlah sebuah proses yang terjadi secara tiba-tiba. Karena perubahan sosial melibatkan individu maupun aktor-aktor negara. Munculnya gagasan-gagasan baru tidak mudah untuk diterima oleh kelompok sosial tertentu. Karena, proses perubahan pola pikir yang sangat sulit untuk diubah. Sebagai contoh dari studi kasus diatas, bahwa untuk sedikit merubah arah politik di Arab Saudi sangatlah sulit karena masyarakat sudah dari dahulu menggunakan sistem-sistem yang dianggap benar. Tetapi untuk menjawab tantangan di masa depan, Arab Saudi harus sedikit merubah cara pandang politiknya. Kemudian, Comte menekankan bahwa perubahan sosial memiliki tahap yang terus maju atau berprogres dari tahap sebelumnya serta dapat membentuk manusia untuk hidup yang maju dan modern (Comte, 1858). Seperti yang terjadi di masyarakat Arab Saudi yang memiliki perubahan sosial yang berprogres mulai dari sulitnya menerapkan kebijakan modernisasi hingga diterapkannya kebijakan modernisasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut dijadikan sebagai sarana modernisasi oleh Arab Saudi yang memiliki sumber pemasukan ekonomi dari sektor minyak bumi mulai dari tahun 1938 minyak bumi ditemukan di Arab Saudi. Pendapatan Arab Saudi 70% disumbang dari hasil minyak bumi dan Arab Saudi menjadi negara yang memiliki cadangan minyak terbanyak di dunia. Tetapi, karena harga minyak bumi tidak stabil membuat Arab Saudi merasa khawatir dengan sumber pemasukan ekonomi terbesarnya. Dengan adanya minyak yang pasang surut membuat Arab Saudi mengalami defisit yang cukup besar. Adanya penurunan harga minyak juga mengakibatkan Arab Saudi dihadapkan dengan berbagai persoalan yang rumit, seperti tingginya kebutuhan perumahan yang layak, meningkatnya jumlah pengangguran, serta besarnya subsidi. Di sisi lain, konsumsi pribadi Arab Saudi mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan Arab Saudi dalam menghadapi kondisi yang seperti ini untuk menyikapi perilaku konsumtif pada masyarakatnya (Hidriyah, 2016).

Dengan terpilihnya Muhammad bin Salman (MBS) sebagai putra mahkota, Arab Saudi banyak mengalami perubahan dari banyak sektor mulai dari sosial hingga budaya. Beberapa kebijakan modernisasi yang dilakukan oleh MBS antara lain mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, mengizinkan adanya konser musik, hingga dibukanya bioskop. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi ekonomi 2030

untuk mendorong ekonomi yang maju dan tidak ketergantungan kepada sumber daya alam. Adanya kebijakan modernisasi ini disambut gembira oleh masyarakat Arab Saudi dengan mengekspresikan kegembiraan mereka melalui media sosial (Aminuddin, 2018).

Selanjutnya, dengan dibukanya bioskop ini dapat mengurangi pengeluaran masyarakat Arab Saudi untuk menonton film di negara lain salah satunya Bahrain. Hal ini karena Arab Saudi tidak membuka bioskop dan membuat masyarakatnya mencari hiburan di negara lain dan membuat masyarakat Arab Saudi membuang uang mereka ke negara lain. Sehingga dengan adanya bioskop di Arab Saudi dapat menambah pemasukan negara dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam mencari hiburan dan membuang uang mereka ke negara lain. Tidak hanya itu saja, dibukanya bioskop dapat mengembangkan bisnis, terutama industri film Arab Saudi yang akan dipasok oleh orang-orang Hollywood. Arab Saudi juga akan menerapkan komisi pajak, pajak insentif untuk produksi film serta memiliki studio film. Pemerintah Arab Saudi berencana akan membuka unit untuk mengembangkan bisnis yang kemudian akan didedikasikan untuk bioskop, game, dan produksi film (Aminuddin, 2018).

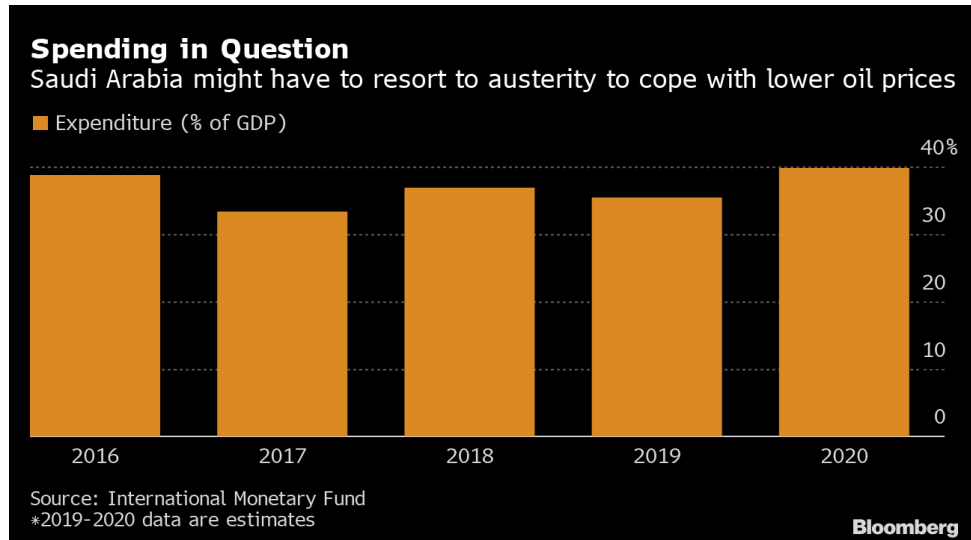
Perusahaan asal Meksiko, Cinepolis yang merupakan perusahaan operator bioskop terbesar ketiga di dunia berencana akan bekerjasama dengan Arab Saudi untuk membangun bioskop dan akan menginvestasikan sekitar 300 juta dollar selama lima tahun untuk mengoperasikan bioskop di seluruh kerajaan Arab Saudi. Adanya proyek ini, bertujuan untuk menawarkan kesempatan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat Arab Saudi. Pengumuman kerjasama ini disampaikan setelah peluncuran dua bioskop pertama Cinepolis di Al Jamea Plaza di Jeddah dan Lulu Mall di Dammam (CNN Indonesia, 2021).

3.1 Dampak Modernisasi Arab Saudi Terhadap Perubahan Sosial

Peluncuran visi 2030 Arab Saudi merupakan rencana ambisius kerajaan untuk mengubah perekonomian dari ketergantungan minyak bumi yang sudah dinikmati masyarakat Arab Saudi selama ini. Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) menilai rencana ini merupakan upaya ambisius yang tidak mudah diraih. Oleh karena ini, IMF turut memperingatkan Arab Saudi mengenai banyaknya tantangan yang akan dihadapi. Sebagai pengalihan dari sektor minyak, Arab Saudi lebih

memperhatikan kepada sektor SDM yang lebih dipentingkan.

Arab Saudi sedang mempersiapkan *roadmap* yang lebih jelas untuk masa depan negara dan bekerja keras dalam menyambut negara pasca minyak. Persiapan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak diiringi upaya Arab Saudi dalam mendorong diversifikasi pendapatan negara. *Roadmap* ini diyakini akan berdampak besar bagi perubahan masyarakat Arab Saudi pada era modern, tidak terkecuali perubahan sosial, politik, hingga militer (Hidriyah, 2016). Masyarakat Arab Saudi kini harus mempersiapkan transformasi yang akan mengurangi jatah kenyamanan mereka selama ini serta banyaknya fasilitas dari negara yang dipangkas akibat turunnya harga minyak dunia.



Gambar 6. Grafik Pengeluaran Arab Saudi untuk Mengatasi Harga Minyak yang Rendah (Omar, 2020)

Meskipun Arab Saudi menjadi negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia hingga 267 miliar barel, situasi menurunnya harga minyak karena pelemahan ekonomi dunia menjadikan anggaran Arab Saudi deficit 87 miliar dolar AS. Kejadian ini memicu Pemerintah Arab Saudi melakukan upaya penyelamatan ekonomi negara. Seperti kebijakan naiknya harga BBM hingga 40% yang diberlakukan sejak Januari 2016. Kemudian, ditambah dengan mengurangi subsidi listrik, air, hingga produk minyak bumi untuk lima tahun ke depan (Hidriyah, 2016).

Adanya visi 2030 yang bertujuan untuk mengalihkan ketergantungan kepada

minyak, beberapa kementerian, lembaga, dan badan pemerintah Arab Saudi menjalani proses restrukturisasi untuk menyelaraskan mereka dengan persyaratan fase ini (Sianturi, 2017). Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka serta dapat memperluas kompetensi mereka. pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan tingkat dan kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat serta bisa mencapai masa depan yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan. Dewan Menteri bertugas dengan Dewan urusan ekonomi dan pembangunan untuk mendirikan dan memantau mekanisme serta langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan visi 2030 (Falahi, 2012). Visi 2030 Arab Saudi merupakan program yang berfokus untuk membuka peluang ekonomi yang berkembang dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM), membuka peluang ekonomi dalam bisnis, memanfaatkan peluang posisi strategisnya, serta melakukan investasi untuk ekonomi jangka panjang (Fajriah, 2016). Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan Arab Saudi untuk investasi adalah penjualan perdana saham Aramco, BUMN Arab Saudi di sektor minyak sebesar 5% dari total sahamnya.

Dari sektor pendidikan sendiri, Arab Saudi sebagai *the heart of Islam* dapat membangun universitas berskala internasional dan mengembangkan serta menambahkan program-program studi lainnya, sehingga akan menarik mahasiswa internasional yang ingin belajar lebih banyak mengenai Islam. Seperti Universitas Islam Madinah yang telah menjalin hubungan kerjasama internasional dengan beberapa universitas di dunia seperti dengan Mawlana Malik University di Indonesia, Dar Al Salam Islamic University serta Rutgers University di Amerika Serikat. Untuk kedepannya, pendidikan tinggi di Arab Saudi dapat membuka jurusan baru lainnya dengan bahasa pengantar, bahasa Inggris. Dengan demikian, akan menarik banyak mahasiswa internasional untuk belajar di Arab Saudi. Hal itu juga akan menjadi tambahan pendapatan baru Arab Saudi. Pemuda di Arab Saudi pun dapat bersaing dengan pemuda internasional lainnya, karena akan di didik untuk siap bersaing secara internasional. Hal ini merupakan salah satu program dari pilar Ambisi Nasional Negara (*An Ambition Nations*). Sebagai jantungnya Islam, Arab Saudi bisa membangun pusat penelitian kajian Islam, karena banyak peninggalan Islam di Arab Saudi.

Kemudian, dari sektor sosial adanya pembaharuan terhadap peran perempuan yang semakin meluas menjadi peluang bagi Arab Saudi untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan seperti menjahit, memasak, hingga

kerajinan tangan. Selain itu, adanya pembaharuan terhadap interaksi antara lawan jenis yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa aspek, diskusi harus dilakukan dengan lawan jenis terlebih lagi dengan persoalan ekonomi. Selanjutnya dari sektor kemausiaan

Visi 2030 ini juga berdampak pada kesetaraan gender di Arab Saudi yang sebelumnya perempuan dianggap sebagai kelas kedua di Arab Saudi. Dengan adanya kebijakan diperbolehkannya perempuan mengendarai mobil kemudian disusul dengan kebijakan dihilangkan izin perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Kebijakan ini untuk mengubah sistem perwalian terbatas yang mengekang kaum perempuan yang telah lama berlaku di Arab Saudi. Sistem perwalian terbatas ini sendiri akan menjadikan perempuan harus memerlukan izin tertulis dari walinya yang merupakan ayah, suami, maupun kerabat laki-lakinya. Perubahan sistem perwalian ini membuat perempuan di Arab Saudi memperoleh hak atas diri mereka sendiri. Kebijakan ini merupakan lompatan terbesar bagi perubahan Arab Saudi yang awalnya sangat konservatif menjadi pro kesetaraan gender. Perempuan juga bisa studi ke luar negeri bahkan bisa bekerja di luar negeri. Tidak hanya itu saja, perempuan juga sudah bisa memasuki bidang politik serta memiliki kesempatan menjadi pemimpin (Nevy Rusmarina Dewi, Azza Ihsanul Fikri, & Afifah Febriani, 2020).

Dari sektor hiburan, banyak negara yang tertarik untuk investasi ke Arab Saudi, salah satunya perusahaan Meksiko (Cinepolis) yang akan membuka 200 bioskop di Arab Saudi pada tahun 2023. Dengan dibukanya bioskop di Arab Saudi ini membuka peluang untuk banyak negara tertarik melakukan investasi. Tidak hanya pada bioskop saja, tetapi banyak sektor yang menarik perhatian negara lain untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Tidak hanya itu saja, visi 2030 juga berdampak pada dunia Islam seperti pada tahun 2015, dimana penduduk muslim di dunia sekitar 1,7 miliar jiwa dan negara-negara muslim menjadi pasar yang sangat potensial. Terdapat tren kemajuan ekonomi yang semakin meningkat di negara-negara Islam, khususnya di negara petrodollar yang diikuti dengan meningkatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Arab Saudi selama ini telah banyak digunakan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur. Pembangunan ini orientasinya dipandang hanya berfokus pada pembangunan fisik saja tetapi kurang berkonsentrasi pada orientasi peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, visi 2030 ini akan berfokus pada orientasi pembangunan dari sumber daya manusia yang mereka miliki dan visi 2030 ini akan memberi pengaruh yang cukup besar kepada kawasan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Arab Saudi sebagai negara yang memiliki nama lengkap Kerajaan Arab Saudi (*Kingdom of Saudi Arabia/Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sa'udiyah*) secara resmi menjadi sebuah negara pada 23 September 1932. Arab Saudi merupakan entitas negara dengan identitas Islam yang kuat sejak runtuhnya dinasti Turki Utsmani, 1924. Arab Saudi menjadi negara yang memiliki landasan konstitusi berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Sejarah modern Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari gerakan kelompok Wahabi yang merupakan gerakan pembaharuan dalam Islam.

Sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia dan sebagian besar pendapatan ekonomi negara berasal dari sektor minyak. Bahkan, Arab Saudi telah menjadi negara yang pendapatan ekonominya memiliki ketergantungan pada minyak. Anjloknya harga minyak dunia pada tahun 2014 membuat Arab Saudi harus berpikir keras tentang ketahanan ekonomi negara. Visi 2030 Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) merupakan gagasan yang sangat besar dari keinginan ambisius untuk melepaskan Arab Saudi dari ketergantungannya kepada sektor minyak serta mendiversifikasi ekonomi dan mengalihkannya pada kekuatan investasi global, layanan publik seperti pariwisata, hiburan, kesehatan hingga pendidikan.

Peran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota cukup besar dalam memodernisasikan Arab Saudi. MBS melalui gagasannya, merumuskan visi 2030 Arab Saudi yang dituangkan pada kebijakan-kebijakannya. Adapun, visi 2030 Arab Saudi terdiri dari 3 pilar penting, yaitu Masyarakat Dinamis (*A Vibrant Society*), Pengembangan Ekonomi (*A Thriving Economy*), dan Ambisi Nasional Negara (*An Ambition Nation*). Ketiga pilar ini kemudian direalisasikan oleh MBS ke dalam beberapa program kerja. Kemudian, untuk mensukseskan visi 2030 Arab Saudi harus melakukan reformasi kebijakan dalam berbagai bidang, yaitu politik, sosial, hingga budaya. Arab Saudi banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup kontras dari citra Arab Saudi yang sebelumnya, mulai dari memberikan kebebasan terhadap perempuan, dibukanya bioskop yang sudah 30 tahun lebih ditutup, hingga diperbolehkannya wisatawan beda gender (belum menikah) menginap dalam satu ruangan. Hal ini dilakukan untuk membangun citra

bahwa Arab Saudi telah menjadi negara terbuka, efektif, dan aman untuk berinvestasi.

Terdapat beberapa kebijakan MBS untuk visi 2030 yaitu pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan aturan konser musik pada tahun 2017, konser ini merupakan konser pertama kali di Arab Saudi dalam 7 tahun terakhir di Jeddah. Kemudian, pemerintah Arab Saudi juga mencabut larangan pada tahun 2017 untuk penggunaan aplikasi Whatsapp, Skype, dan sebagainya. Kemudian diperbolehkannya perempuan mengemudi pada tahun 2018 serta dibukanya bioskop secara resmi setelah 30 tahun lebih ditutup. Kemudian, dihapusnya perwalian untuk perempuan Arab Saudi. Hingga kebijakan visa untuk turis untuk keperluan wisata. Hal ini tidak pernah terjadi di masa sebelumnya dalam sejarah Arab Saudi, sehingga menimbulkan pro dan kontra dimana pada awal kebijakan ini terdapat beberapa masyarakat kurang setuju karena masih memiliki pemikiran yang primitif serta beberapa ulama kurang setuju dengan kebijakan modernisasi MBS tersebut. Tetapi banyak masyarakat yang mendukungnya khususnya kalangan perempuan karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan untuk mendukung perempuan dalam menyalurkan bakat-bakatnya serta memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Auguste Comte memandang bahwa perubahan sosial merupakan proses yang berperprogres atau maju pada setiap tahapnya hingga mencapai masyarakat yang lebih berkembang dan modern. Perubahan sosial disini dimulai dari tahap yang primitif yang terus berlanjut hingga tahap menerima perubahan serta mulai mengalami kemajuan atau modern. Untuk mencapai perubahan sosial tidaklah mudah dilakukan, karena masyarakat yang sudah memiliki pemikiran dominan akan sulit untuk mengalami perubahan. Sehingga proses perubahan sosial ini dilakukan secara bertahap yang terus mengalami perkembangan pada setiap tahapnya.

Meskipun visi 2030 ini membuat Arab Saudi mengeluarkan banyak kebijakan baru terutama lebih mengutamakan sektor sumber daya manusia untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak, tetapi Arab Saudi tidak mengurangi serta menghilangkan sektor minyak untuk pemasukan negaranya. Visi 2030 ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak karena harga minyak tidak menentu atau sering naik turun. Sehingga jika harga minyak sedang turun, Arab Saudi masih memiliki pemasukan negara dari sektor yang lain yaitu dari sumber daya manusia. Langkah ini merupakan langkah yang cukup strategis serta cukup banyak membuat publik ramai, karena Arab Saudi yang

dipandang sebagai negara Islam dan merubah negaranya menjadi negara yang lebih modern.

4.2 Saran

Melihat dari analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini yang hanya berfokus pada kebijakan modernisasi Arab Saudi oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman dari sisi ekonomi saja. Adanya modernisasi ini diharapkan bisa membawa Arab Saudi menjadi negara yang maju dan baru. Tetapi dari penelitian ini, penulis belum menganalisis kebijakan tersebut dari segi agama Islam secara mendalam. Penulis lebih berfokus bagaimana langkah-langkah dari MBS untuk mengsuskeskan program tersebut serta melihat kebijakan tersebut mempengaruhi terhadap perubahan sosial di Arab Saudi. Oleh karena itu, penulis mengharapakan agar penelitian selanjutnya bisa meneliti dari pandangan Islam terkait program modernisasi MBS secara menyeluruh serta menganalisis bagaimana pandangan atau respon dunia terhadap Arab Saudi yang menjadi negara Islam serta memiliki dua kota suci bagi umat Islam dengan adanya kebijakan baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Citra Nur Hikmah &. (2019). Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 27-39.
- Adiwijaya, S. (2020). *Arab Kucurkan Duit Rp 18,12 Triliun Bangun Bioskop*. Jakarta: Tagar.id.
- Aminuddin, C. (2018). *5 Alasan Arab Saudi Mencabut Pelarangan Bioskop*. Jakarta: TEMPO.CO.
- Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi. (2021). REFORMASI HAK-HAK PEREMPUAN ARAB SAUDI MELALUI SAUDI VISION 2030 TAHUN 2017-2019. *Open Jurnal Sistem*, 1-12.
- Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan. (2021). Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi. *Global & Policy*, 39-50.
- AZIS, S. L. (2016). PENDIDIKAN ISLAM DI SAUDI ARABIYAH DAN SEKITARNYA PASCA JATUHNYA TURKI USMANI. *Jurnal Kajian Sosial, Agama dan Pendidikan*, 137-167.
- Bolo, A. D. (2019). PEMIKIRAN FILOSOFIS (DI) INDONESIA: SEBUAH TELAAH HERMENEUTIS. *jurnal MELINTAS*, 159-173.
- Cahayani, I. (2021). *Keberhasilan Visi 2030 Arab Saudi di Sektor Staycation*. kumparan.com.
- CEIC Data. (2021). *Arab Saudi Konsumsi Pribadi:% dari PDB*. ceicdata.com.
- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosial Dakwah. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 14-26.
- CIEC DATA. (2020). *Arab Saudi Pendapatan Pariwisata*. ciecddata.com.
- Citra Nur Hikmah & Abrar. (2019). Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 27-39.
- CNN Indonesia. (2020). *Jejak Reformasi Arab Saudi dan Jalan Menuju Islam Modern*. Jakarta: cnnindonesia.com.
- CNN Indonesia. (2021). *Perusahaan Meksiko Akan Buka 200 Bioskop di Arab Saudi*. Jakarta: cnnindonesia.com.
- Comte, A. (1858). *Positive Philosophy*. United States: C. Blanchard.

- Dayana, A. S. (2019). *Arab Saudi Izinkan Pasangan Turis Belum Nikah untuk Sewa Hotel*. tirtto.id.
- Duetsche Welle. (2019). *Pertama Kali dalam Sejarahnya, Arab Saudi Tawarkan Visa Turis Mancanegara*. DW.com.
- EIA (Energy Information Administration). (2005). *Saudi Arabia Country Analysis Brief*. Washington D.C: EIA by FirstGov.
- Fajriah, L. R. (2016). *Arab Saudi Setop Kecanduan Minyak, Sudirman Said Lihat Peluang*. Jakarta: SINDONEWS.com.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Falahi, Z. (2012). Prospek Regionalisme Timur-Tengah Pasca-Arab Spring: Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab. *Jurnal Kajian Wilayah*, 189-205.
- Fauzan, P. I. (2018). Model Penerapan Syariah dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, dan Indonesia). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 52-70.
- Grigsby, H. (2015). *Women2Drive Movement Contemporary Saudi Consciousness on Women's Position in Society*. Concordia Collage: reseacrhgate.net.
- Haif, A. (2015). PERKEMBANGAN ISLAM DI ARAB SAUDI (STUDI SEJARAH ISLAM MODERN). *Jurnal Rihlah*, 12-24.
- Hardiwidjaja, M. (2007). PEREMPUAN YANG TERMARJINALKAN. 109-192.
- Hartono. (2019). Menuju Modernisasi Pendidikan Islam. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 41-51.
- Haryadi, P. (2018). Peran Muhammad bin Salman terhadap Perupabahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi. *Jurnal ICMES*, 25-47.
- Haryanti, R. (2019). *6 Terobosan Arab Saudi Bangkitkan Industri Pariwisata dan Hiburan*. KOMPAS.com.
- Hasugian, M. R. (2018). *6 Perubahan Terbesar Terjadi di Arab Saudi Tahun 2018*. Jakarta: TEMPO.CO.
- Hens, H. (2019). *6 Kebijakan Radikal Pemerintah Arab Saudi demi Gaet Turis Asing*. m.liputan6.com.
- Hidriyah, S. (2016). *REFORMASI EKONOMI ARAB SAUDI*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Press.
- Hikmah, C. N. (2019). Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 27-39.

- Indriana Kartini, M. F. (2020). *Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Iswara, A. J. (2022). *Dulu Melarang Bioskop, Arab Saudi Kini Menggelar Festival Film Besar*. Jeddah: KOMPAS.com.
- JAZEERA, A. (2020). *Profile: King Salman's youngest brother, Ahmed bin Abdul Aziz*. Al Jazeera Media Network.
- Machmudi, R. H. (2017). Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 1-21.
- Mansyuroh, F. A. (2020). PEREMPUAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM (Studi Kasus Dekrit Kerajaan Arab Saudi Nomor M/134 Tahun 2019). *Journal of Gender Studies*, 93-103.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Mega Hardiyanti & Sri Yuniati . (2021). Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi Arabia 2030). *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1-11.
- Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya. (2021). Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030. *Journal of International Relations*, 123-130.
- MOESLIM CHOICE. (2020). *Investasi Bioskop di Arab Saudi Capai 18 Triliun pada 2020*. moeslimchoice.com.
- Muhardiansyah & Radhi Darmansyah, M. (2018). PENGEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL SELAMA KEPEMIMPINAN GUBERNUR ZAINI ABDULLAH (STUDI PENELITIAN KABUPATEN ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 290-303.
- MUJIHASTUTI, N. A. (2019). *ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI TENTANG PERAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK: STUDI KASUS ROYAL DECREE NO. M/85 TAHUN 2017*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Nadia. (2020). SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 162-175.
- Nevy Rusmarina Dewi, Azza Ihsanul Fikri, & Afifah Febriani. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Jurnal Sosial Politik*, 32-44.

- Newswire. (2021). *Ekonomi Arab Saudi Melonjak Berkat 'Staycation'*. Jakarta: Bisnis.com.
- Omar, A. A. (2020). *Saudi Arabia's Economy Can Ill Afford Oil-Price War It Began*. Bloomberg Quint.
- Perdana, A. V. (2019). *Cetak Sejarah, Arab Saudi Kini Resmi Terbuka untuk Pariwisata dan Terbitkan Visa Turis*. Kompas.com.
- Rahayu, T. I. (2010). TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KE-3 DALAM TEORI. 69-82.
- Roji, F. (2017). KEBIJAKAN RUANG PUBLIK PEREMPUAN: Agenda Politik Double Interest Saudi. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 271-284.
- Rosana, E. (2011). MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal TAPIS*, 32-47.
- Rosida, A. (2018). WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN, PERAN PEREMPUAN. *Journal of Social-Religion Reseacrh*, 81-96.
- Sianturi, N. (2017). PENGARUH SAUDI VISION 2030 DAN AGENDA FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ARAB SAUDI DI INDONESIA. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1-15.
- Subarkah, M. (2020). *Arab Saudi Mulai Pulih, Ekonomi Nonmigas Tumbuh*. Riyadh: REPUBLIKA.CO.ID.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Syarifudin. (2021). *Meksiko Buka 200 Bioskop di Arab Saudi pada 2030, Dukung Visi 2030*. Riyadh: SINDONEWS.com.
- TEMPO.CO. (2019). *Bioskop Kedua di Arab Saudi Resmi Berdiri*. Jakarta: TEMPO.CO.
- Wafi, M. H. (2018). Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi Dan Wahabi. *Islamic World and Politics*, 229-239.
- Wijayanti, D. (2002). MELACAK PEMBUKTIAN TEORI-TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN. Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN*, 181-186.
- Yahya Al Alhareth, Ibtisam Al Dighrir, & Yasra Al Alhareth. (2015). Review of Women's Higher Education in Saudi Arabia. *American Journal of Educational Research*, 10-15.